

PEMERINTAH KOTA JAMBI

RENCANA STRATEGIS
PERUBAHAN TAHUN
2024 - 2026

DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan petunjuk, taufik dan hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2024 – 2026 dapat diselesaikan.

Dalam Rencana Strategis ini disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024 - 2026 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kementerian Sosial RI yang selanjutnya dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Jambi melalui program – program serta kegiatan – kegiatan prioritas disamping kegiatan – kegiatan lain sesuai dengan tugas pokok organisasi.

Penyusunan Renstra ini sangat disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan Renstra ini, semoga apa yang dihasilkan dari penyusunan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama Dinas Sosial Kota Jambi beserta perangkatnya.

Demikianlah penyusunan Rencana Strategis ini dibuat untuk dapat sebagai pedoman didalam melaksanakan tugas pelayanan kedinasan kepada masyarakat, dan Kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu tentunya mengharapakan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif untuk kesempurnaan pelaksanaan tugas kedepan, Terima kasih.

Jambi, 21 Mei 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA JAMBI**



YUNITA INDRAWATI, AP. MP. CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19740607 199403 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi	8
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kota Jambi	14
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Jambi.....	31
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	48
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA JAMBI.....	50
3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kota Jambi	50
3.2 Isu Strategis	57
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	58
4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2024-2026.....	60
4.2. Cascading Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi.....	61
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	61
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	63
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
BAB VIII PENUTUP	73

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.1 Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kota Jambi menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2023.....	14
Tabel.2 Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kota Jambi menurut Jabatan dan Eselon Tahun 2023	15
Tabel.3 Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kota Jambi menurut Tingkat Pendidikan dan Eselon Tahun 2023	16
Tabel.4 Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kota Jambi yang telah mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	16
Tabel.5 Daftar Alat-alat Besar & Alat-alat Angkutan Dinas Sosial Kota Jambi Periode 30 Desember 2022	17
Tabel.6 Daftar Alat-alat Bengkel & Ukur, Alat-alat Pertanian& Peternakan Dinas Sosial Kota Jambi Periode 30 Desember 2022	18
Tabel.7 Daftar Alat-alat Kantor & Rumah Tangga Dinas Sosial Kota Jambi Periode 30 Desember 2022	19
Tabel.8 Daftar Alat-alat Studio & Alat-alat Komunikasi, Alat-alat Kedokteran, Alat-alat Laboratorium dan Alat-alat Keamanan Dinas Sosial Kota Jambi Periode 30 Desember 2022	28
Tabel.9 Daftar Pengadaan Gedung & Bangunan, Jalan Irigasi & Jaringan Dinas Sosial Kota Jambi Periode 30 Desember 2022	30
Tabel.T-23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Jambi.....	37
Tabel.T-24 Anggaran dan Realisasi Pendannan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Jambi	39
Tabel.10 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	52
Tabel.T-25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Jambi	59
Tabel.T-26 Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan	62
Tabel.T-28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Dinas Sosial Kota Jambi	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

Pada Tahun 2023, saat ini masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Jambi akan berakhir, sedangkan Pemilihan bupati dan Wakil bupati akan dilakukan serentak pada Tahun 2024. Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, mengamanatkan bahwa Daerah dengan Bupati/Walikota yang masa Jabatannya Berakhir Tahun 2023 agar menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 tersebut sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana strategis OPD.

Berdasarkan hal dimaksud Dinas Sosial Kota Jambi menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023-2026.

Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023-2026 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kota Jambi untuk periode 2023-2026 sebagai acuan dalam proses perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Jambi yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah untuk jangka waktu tiga tahun.

Rancangan Awal Renstra Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023-2026 juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti Renstra

Kementerian Sosial, Renstra Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi serta sejumlah dokumen terkait lainnya.

Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2023-2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPD. Dalam hal ini Renstra Dinas Sosial Kota Jambi disusun untuk digunakan pada masa transisi perencanaan selama 3 tahun dengan mempertimbangkan RPD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam rangka peningkatan harkat, martabat dan kualitas hidupnya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai permasalahan sosial yang timbul, dengan mengedepankan prakarsa dan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada. Hal ini telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.

Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PPKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PPKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PPKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (volunteerism), dan nilai-nilai

kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia.

Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni adanya peningkatan produktivitas PPKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PPKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan.

Permasalahan kesejahteraan Sosial cenderung meningkat, seiring dengan deras nya arus globalisasi yang melanda dunia termasuk Indonesia, Sementara itu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan sosial terus meningkat dan professional seiring dengan dengan Hak-haknya selaku warga Negara. Oleh sebab itu berbagai dampak positif dan negative dari persoalan sosial semakin meningkat. Pembangunan kesejahteraan Sosial ke depan akan semakin komplek dan multi demisional, karena masalah sosial dan yang berada di lapisan bawah, yang dampaknya langsung berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti disintegrasi sosial, diskriminasi sosial, kesenjangan sosial, sistem nilai budaya bangsa (kesetiakawanan sosial) dan sebagainya.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah khususnya masalah kesejahteraan Sosial diperlukan adanya perencanaan yang komprehensif, dengan membuat rencana berupa Perencanaan Strategis OPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI sebagai acuan OPD dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya untuk dapat mencapai sasaran yang diharapkan, dan untuk selanjutnya Perencanaan Strategis OPD tersebut tertuang dalam Dokumen yang disebut dengan : DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN 2024 - 2026.

Rencana Strategis atau yang lebih sering disebut RENSTRA adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan

lingkungan strategis. Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan Yuridis Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Jambi Periode 2024-2026 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi jambi Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005 – 2025. (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023.
21. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023
22. Peraturan Walikota Jambi Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Jambi;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra ini untuk meletakkan pedoman, kebijakan, arah dan sasaran serta program dan rencana strategis Dinas Sosial Kota Jambi untuk Jangka menengah sesuai dengan fungsi, kedudukan tugas sekretariat, bidang dan rincian tugas sub bagian, seksi dan tata kerja pada Dinas Sosial Kota Jambi untuk periode Tahun 2024 – 2026 dengan berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017 dan Inmendagri no 52 Tahun 2022, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2024 -2026 adalah :

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijaksanaan 3 (tiga) tahun kedepan.

2. Menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, Target Kinerja dan Pagu Pendanaan Indikatif sebagai rencana aksi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan.
3. Menetapkan Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.
4. Menetapkan Rencana Pencapaian Kinerja, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Jangka Menengah Pelayanan PD

1.4. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan RPD Kota Jambi Tahun 2024–2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari 9 bab, dengan uraian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Dalam BAB Pendahuluan ini terdiri atas beberapa sub bab meliputi:

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan keterkaitan antara Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Memuat informasi Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah Dinas Sosial dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah

dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada tiga tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan yang diuraikan berdasarkan penyelenggaraan urusan Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 3 (tiga) tahun mendatang

3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel TB.35.

3.2 Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.
- Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu

strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan Rancangan Pembanguna Daerah Pemerintah Kota Jambi untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan Cascading Kinerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran Penyelarasan Kinerja OPD secara vertical antara atasan dan bawahan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26. Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan dan sasaran RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari Perumusan rencana program,

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini Memuat penjelasan Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi

2.1.1 Tugas OPD Dinas Sosial Kota Jambi

Dinas Sosial merupakan salah satu OPD di Kota Jambi. Pendirian Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 50 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Sosial Kota Jambi, maka Dinas Sosial mempunyai TUGAS yaitu :

"Membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial yang meliputi : Tugas Perencanaan, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pelayanan dan Pembangunan di bidang sosial serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya yang terdiri dari sekretariat dan empat bidang yang meliputi bidang perlindungan jaminan sosial dan warga negara migran, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan bencana"

2.1.2 Fungsi OPD Dinas Sosial Kota Jambi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Sosial Kota Jambi, mempunyai fungsi :

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan jaminan sosial dan warga negara migran, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan bencana;
2. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
3. Penetapan standar rehabilitasi sosial;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial;

7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Sosial di daerah;
8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kesejahteraan sosial ,serta penyuluhan sosial; dan
9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas sosial;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.2.1 Tugas dan fungsi dari organisasi Dinas Sosial Kota Jambi

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing organisasi yang ada pada Dinas Sosial Kota Jambi berdasarkan Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 50 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Sosial Kota Jambi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
 - Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 - Sekretariat mempunyai Tugas yaitu Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi :
 - 1) Perencanaan dan program;
 - 2) Keuangan dan barang milik daerah;
 - 3) Umum dan kepegawaian;dan
 - 4) Tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
 - Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai Fungsi sebagai berikut :
 - a) Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian,perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
 - b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian,perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset serta evaluasi dan pelaporan;
 - c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
 - d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan umum dan perencanaan ,keuangan ; dan

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Warga Negara Migran :

- Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;
- Bidang Perlindungan dan jaminan sosial mempunyai Tugas yaitu : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi :
 - 1) perlindungan jaminan sosial anak terlantar;
 - 2) perlindungan jaminan sosial penanganan fakir miskin; dan
 - 3) bantuan masyarakat dan warga negara migran
- Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Bidang perlindungan jaminan sosial dan warga negara mempunyai Fungsi sebagai berikut :
 - a) Perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pendataan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan serta di bidang jaminan sosial dan warga negara migran;
 - b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan jaminan sosial dan warga negara migran;
 - c) Pelaksanaan administrasi bidang perlindungan jaminan sosial dan warga negara migran; dan
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial :

- Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;
- Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai Tugas yaitu : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dalam urusan rehabilitasi sosial yang meliputi :
 - 1) Rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial terlantar;

- 2) Rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya; dan
 - 3) kerjasama antar lembaga dan kemitraan rehabilitasi sosial
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai Fungsi sebagai berikut :
 - a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan fisik, eks tuna susila, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana , eks psikotropika dan korban penyalahgunaan narkoba, orang dengan HIV/AIDS, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, anak terlantar dan pengangkatan anak, lanjut usia terlantar dan anak dengan kebutuhan khusus;
 - b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial;
 - c) Pelaksanaan administrasi bidang rehabilitasi sosial;
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Penanganan Bencana :
- Bidang Penangan Bencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;
 - Bidang Penanganan Bencana mempunyai Tugas yaitu Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan penanganan bencana yang meliputi :
 - 1) Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial;
 - 2) Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial; dan
 - 3) Pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana; dan
 - 4) Pelaksanaan Tugas Lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan Bidang Tugasnya.
 - Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Penanganan Bencana mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis

dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan bencana;

- b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- c) Pelaksanaan administrasi bidang penanganan Bencana; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pemberdayaan Sosial :

- Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;
- Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai Tugas yaitu Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Sosial yang meliputi :
 - 1) Pemberdayaan Sosial Perseorangan dan keluarga;
 - 2) Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Kepahlawanan dan Restorasi Sosial; dan
 - 3) Pengumpulan Sumbangan dan Komunitas Adat Terpencil.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai Fungsi sebagai berikut :
 - a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi serta sumber daya kesejahteraan sosial, keahlawanan dan restorasi sosial serta pengumpulan sumbangan dan KAT;
 - b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - c) Pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan sosial ; dan
 - d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- Kelompok jabatan fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pejabat fungsional yang menjadi sub koordinator merupakan jabatan fungsional hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- Sub Koordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

2.1.3 STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Adapun Struktur Organisasi Kepegawaian dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan pada Dinas Sosial Kota Jambi berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 50 tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta ta kerja pada Dinas Sosial Kota Jambi terdiri dari :

- 1) Unsur pimpinan yaitu : Kepala Dinas
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan yaitu :
 - a) Sekretaris, yang dibantu oleh :
 - (1) Sub koordinator perencanaan dan program;
 - (2) Sub koordinator Keuangan dan barang milik daerah;dan
 - (3) Kepala sub bagian umum dan kepegawaian
 - b) Kepala bidang perlindungan jaminan sosial dan warga negara migran yang dibantu oleh:
 - (1) Sub koordinator perlindungan jaminan sosial anak terlantar;
 - (2) Sub koordiantor perlindungan jaminan sosial penanganan fakir miskin;dan
 - (3) Sub koordinator bantuan masyarakat dan warga negara migran.
 - c) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, yang dibantu oleh:
 - (1) Sub koordinator rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar;
 - (2) Sub koordinator rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;dan
 - (3) Sub koordinator kerjasama antar lembaga dan kemitraan rehabilitasi sosial.
 - d) Kepala Bidang Penanganan Bencana, yang dibantu oleh :
 - (1) Sub koordinator penanganan korban bencana alam dan sosial;
 - (2) Sub koordinator perlindungan korban bencana alam dan sosial; dan
 - (3) Sub koordinator pemberdayaan kesiapsiagaan bencana.

e) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, yang dibantu oleh:

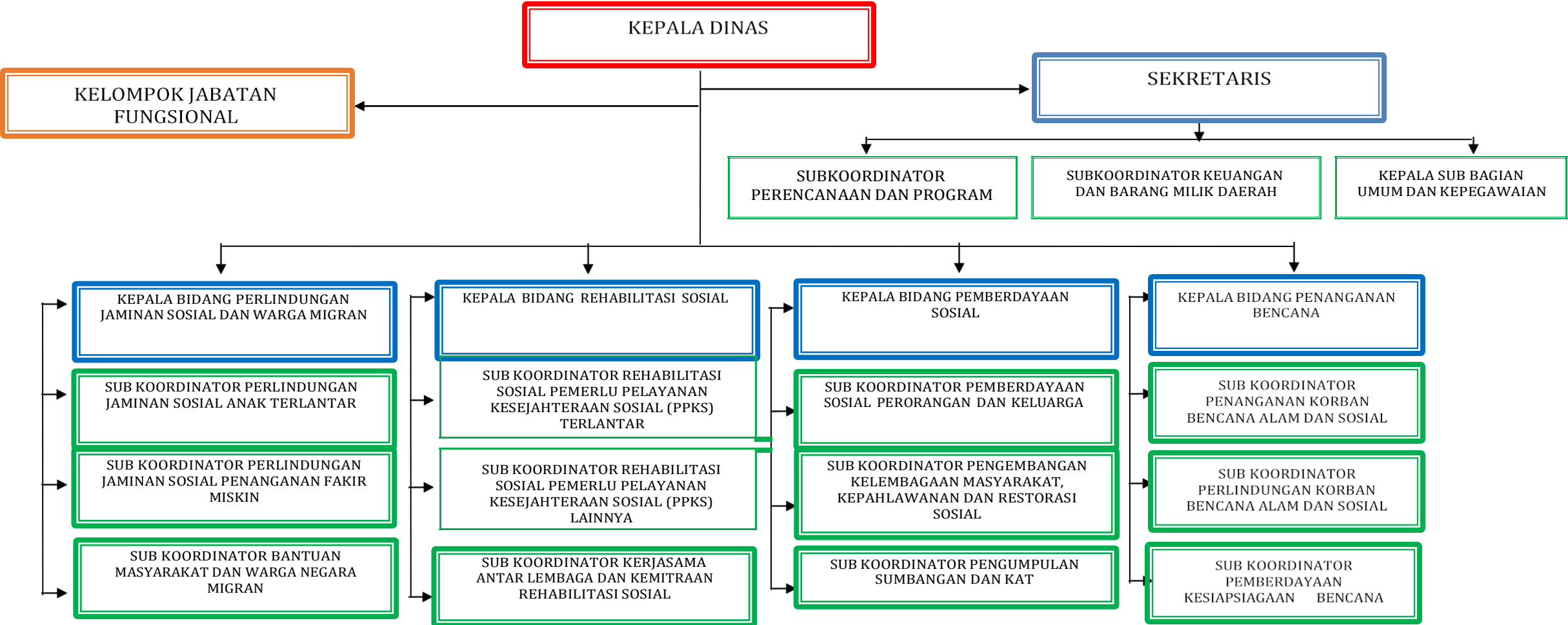
- (1) Sub koordinator pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga;
- (2) Sub koordinator pengembangan kelembagaan masyarakat keahlawanan dan restorasi sosial;dan
- (3) Sub koordinator pengumpulan sumbangan dan KAT.

f) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 50 tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Sosial Kota Jambi dapat dilihat sebagai Berikut .

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Perwal Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kota Jambi



2.2 SUMBER DAYA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

2.2.1 SUMBER DAYA PERSONIL DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Jambi. Integritas dan kompetensi sumber daya manusia merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas penanganan rmasalah kesejahteraan sosial (PPKS).

Sumber Daya Personil OPD yang merupakan Faktor pendukung utama dalam melaksanakan Program Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelayanan di Bidang Sosial sangat di dukung oleh Kuantitas dan Kualitas Jumlah Pegawai pada Dinas Sosial Kota Jambi.

Hal ini dari dilihat dari Tabel Jumlah Pegawai menurut Jabatan, Eselon, Pangkat, Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Diklat Penjenjangan Tahun 2023 Dinas Sosial Kota Jambi tersebut dibawah ini yang terdiri dari :

Tabel. 1
Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan
Dinas Sosial Jambi Tahun 2023

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	2	3	4
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	3 orang
2.	Pembina	IV/b	3 orang
3.	Pembina	IV/a	7 orang
4.	Penata Tk. I	III/d	13 orang
5.	Penata	III/c	-
6.	Penata Muda Tk.I	III/b	-
7.	Penata Muda	III/a	5 orang
8.	Pengatur Tk.I	II/d	1 orang
9.	Pengatur	II/c	2 orang
10.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1 orang
11.	Pengatur Muda	II/a	-
12.	Juru	I/d	-
13.	Juru Tk.I	I/c	1 orang
14.	Juru Muda Tk.I	I/b	-
15.	Juru Muda	I/a	-
16.	Pegawai Kontrak	-	45 orang
Jumlah			81 orang

Sumber : Subbag Kepegawaian Dinsos Kota Jambi Tahun 2023

Tabel. 2

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Eselon

Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas	II.b	1 orang
2.	Sekretaris	III.a	1 orang
3.	Kepala Bidang	III.b	4 orang
4.	Kepala Sub Bagian	IV.a	1 orang
5.	Fungsional Perencana	-	1 orang
6.	Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah	-	1 orang
7.	Fungsional Pekerja Sosial	-	2 orang
8.	Fungsional Penyuluh Sosial	-	12 orang
9.	Fungsional Arsiparis	-	2 orang
10.	Staf Pelaksana	-	11 orang
11.	Tenaga Kerja Kontrak	-	45 orang
Jumlah			81 orang

Sumber : Subbag Kepegawaian Dinsos Kota Jambi Tahun 2023

Tabel. 3

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pasca Sarjana (S.2)	7 Orang	2 Orang	9 Orang
2.	Sarjana (S.1) / Diploma IV	18 Orang	22 Orang	40 Orang
3.	Diploma III	1 Orang	2 Orang	3 Orang
4.	Tingkat SLTA	20 Orang	6 Orang	25 Orang
6.	Tingkat SLTP	2 Orang	1 Orang	3 Orang
7.	Tingkat SD	-	-	-
Jumlah		48 Orang	33 Orang	81 Orang

Sumber : Subbag Kepegawaian Dinsos Kota Jambi Tahun 2023

Tabel. 4
Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Diklat Struktural & Fungsional
Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	2	4
1.	Diklatpim II / Spati	3 orang
2.	Diklatpim III / Spama	3 orang
3.	Diklatpim IV / Adum / Adumla	20 orang
4.	Diklat Teknis Fungsional Bidang Sosial	7 orang
5.	Diklat Teknis Fungsional Bidang Lainnya	64 orang
Jumlah		101 orang

Sumber : Subbag Kepegawaian Dinsos Kota Jambi Tahun 2023

3 SUMBER DAYA ASET / MODAL OPD

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, sangat didukung oleh Sumber Daya Aset Tetap, Adapun Aset Tetap sebagai Modal pendukung kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan administrasi pemerintahan yang meliputi Urusan Sosial , serta dibantu oleh Sekretariat pada Dinas Sosial Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel sebagaimana yang tertera pada Daftar Lampiran Renstra Sumber Daya Aset Tetap Dinas Sosial Kota Jambi yang terdiri dari :

- 1) Peralatan dan Mesin
 - Alat-alat Besar
 - Alat-alat Angkutan
 - Alat-alat Bengkel & Alat Ukur
 - Alat-alat Pertanian & Peternakan
 - Alat-alat Kantor & Rumah Tangga
 - Alat-alat Studio & Komunikasi
 - Alat-alat Kedokteran
 - Alat-alat Laboratorium
 - Alat-alat Keamanan
- 2) Pengadaan Gedung dan Bangunan
- 3) Jalan dan Irigasi

Tabel. 5

DAFTAR ALAT-ALAT BESAR & ALAT-ALAT ANGKUTAN

Pada OPD Dinas Sosial Kota Jambi

Periode s/d Desember Tahun 2022

No	URAIAN JENIS ASET		Merk / Tipe / Spesifikasi	Kuantitas	Satuan Ukuran	Sumber Dana (APBD / APBN)	Tahun	Kondisi (Baik / Rusak / Rusak Berat)
1	2		3	4	5	6	7	8
I.	ALAT-ALAT BESAR		Mesin Pompa Shimizu	1	Unit	BTT	2020	Baik
			Mesin Pompa Air Shimizu	1	Unit	APBD	2021	Baik
			Mesin Pompa Air Sanyo	1	Unit	APBD	2021	Baik
II. 1.	ALAT-ALAT ANGKUTAN Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon		Daihatsu Grandmax	1	Unit	APBD	2021	Baik
			Toyota Calya	1	Unit	APBD	2018	Baik
			Toyota Kijang Innova	1	Unit	APBD	2016	Baik
			Toyota Avanza	1	Unit	APBD	2015	Baik
			Suzuki Ertiga (GX)	1	Unit	APBD	2012	Baik
			Toyota Avanza	1	Unit	APBD	2008	Baik
			Toyota Kijang Inova E	1	Unit	APBD	2005	Rusak Ringan
2.	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up		Toyota Hilux	1	Unit	APBD	2021	Baik
			Isuzu Diesel	1	Unit	APBN	2016	Baik
			Mitsubishi Truck	1	Unit	APBD	2013	Baik
			Toyota Hilux	1	Unit	APBD	2013	Baik
			Mitsubshi	1	Unit	APBN	2013	Baik
			Doble Strada					
			Isuzu Colt	1	Unit	APBN	2013	Baik
			Toyota Kijang Kapsul	1	Unit	APBD	2005	Rusak Ringan
3.	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor							
	1)	Honda Beat	125 CC	2	Unit	APBD	2022	Baik
2)	Honda Beat	125 CC	2	Unit	APBD	2017	Baik	

	3)	Kawasaki Trail	150 cc	1	Unit	APBN	2016	Baik
	4)	Yamaha Byson	150 cc	1	Unit	APBD	2014	Baik
	5)	Yamaha Vega RR	110 cc	1	Unit	APBD	2014	Baik
	6)	Yamaha Soul GT	115 CC	1	Unit	APBD	2013	Baik
	7)	Yamaha Fino	125 CC	6	Unit	APBD	2013	Baik
	8)	Yamaha Xeon	125 cc	4	Unit	APBD	2012	Baik
	9)	Honda Revo CW	110 CC	4	Unit	APBD	2011	Baik
	10)	Honda New Vario CW	110 CC	2	Unit	APBD	2011	1 Baik 1 Rusak Ringan
	11)	Honda New Vario CBS	110 CC	2	Unit	APBD	2010	Baik
	12)	Honda Win Sport	97 CC	1	Unit	APBN	1997	Rusak Ringan
4.	Alat-alat Angkutan di atas Air		Speed Boad	1	Unit	APBN	2009	Rusak

Tabel. 6

DAFTAR ALAT-ALAT BENGKEL & UKUR DAN ALAT-ALAT

PERTANIAN & PETERNAKAN

Pada OPD Dinas Sosial Kota Jambi

Periode s/d Desember Tahun 2022

No	URAIAN JENIS ASET	Merk / Tipe / Spesifikasi	Kuantitas	Satuan Ukuran	Sumber Dana (APBD / APBN)	Tahun	Kondisi (Baik / Rusak / Rusak Berat)
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	ALAT-ALAT BENGKEL & ALAT-ALAT UKUR						
1.	Mesin Genset		1	Unit	APBN	2009	Hilang
2.	Mesin Genset		1	Unit	APBD	2021	Baik
IV.	ALAT-ALAT PERTANIAN & PETERNAKAN						
1.	Mesin Pemotong Rumput	Tanaka	1	Unit	APBD	2013	Baik
2.	Mesin Pemotong Rumput	Tagawa	1	Unit	APBD	2011	Hilang
3.	Pisau Mesin Potong Rumput	Cutter Blade	3	Buah	APBD	2011	Rusak
4.	Gerinda / Batu Asah	Cutter Blade	1	Buah	APBD	2011	Rusak

Tabel. 7

DAFTAR ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

Menurut Jenis Golongan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Pada OPD Dinas Sosial Kota Jambi

Periode s/d Desember Tahun 2022

No	URAIAN JENIS ASET	Merk / Tipe / Spesifikasi	Kuantitas	Satuan Ukuran	Sumber Dana (APBD / APBN)	Tahun	Kondisi (Baik / Rusak / Rusak Berat)
1	2	3	4	5	6	7	8
V.1	ALAT-ALAT KANTOR						
1.	KOMPUTER / PC						
	▪ Komputer all in one	Lenovo	5	Unit	APBD	2022	Baik
	▪ Komputer all in one	HP	1	Unit	APBD	2021	Baik
	▪ Komputer all in one	Asus	4	Unit	APBD	2020	Baik
	▪ Komputer all in one	Lenovo	1	Unit	APBD	2019	Baik
	▪ Komputer all in one	Asus	2	Unit	APBD	2019	Baik
	▪ Komputer all in one	Asus	5	Unit	APBD	2018	Baik
	▪ Komputer/pc	Acer	2	Unit	APBD	2016	Rusak
	▪ Komputer / PC	Power UP	1	Unit	APBD	2012	Rusak
	▪ Komputer/ PC		1	Unit	APBD	2009	Rusak
	▪ UPS		1	Unit	APBD	2009	Rusak
	▪ Stabillizer		1	Unit	APBD	2009	Rusak
	▪ Hardisk Eksternal		3	Buah	APBD	2009	Rusak
	▪ Flashdisk	8 GB	5	Buah	APBD	2011	Rusak
	▪ Modhem	Mobinil	2	Buah	APBD	2011	Rusak
3.	MESIN TIK						
	Mesin Tik uk. Sedang	Royal R13DLZ	1	Unit	APBD	2011	Rusak
	Mesin Tik uk. Sedang	Brothers	2	Unit	APBD	2009	Rusak
	Mesin Tik uk. Besar	Royal	1	Unit	APBD	2008	Rusak
	Mesin Tik uk. Sedang	Royal	2	Unit	APBD	2007	Rusak
4.	KOMPUTER / NOTEBOOK / TABLET						
	▪ Tablet	Samsung	20	Unit	APBD	2022	Baik
	▪ Tablet	Advan	3	Unit	APBD	2020	Baik
	▪ Laptop	Lenovo	3	Unit	APBD	2020	Baik
	▪ Laptop	Asus	3	Unit	APBD	2017	Baik
	▪ Laptop	Dell Inspiron 5420	4	unit	APBD	2013	Baik
	▪ Laptop	Dell Inspiron N4110	1	Unit	APBD	2013	Baik
	▪ Notebook	Acer	6	Unit	APBD	2013	Baik

		Aspireone 725					
	▪ Notebook	ONE A0725	9	Unit	APBD	2013	Baik
	▪ Notebook	Thosiba	1	Unit	APBD	2012	Baik
	▪ Notebook	Acer Aspire	2	Unit	APBD	2012	Baik
	▪ Tablet PC	Samsung	2	Unit	APBD	2012	Rusak
	▪ Laptop 14 inchi	Dell Inspiron 4050	1	Unit	APBD	2011	Rusak
	▪ Laptop 14 inchi	Accer 4253- E351G32M n	1	Unit	APBD	2011	Rusak
	▪ Laptop 14 inchi	Thosiba SL645- 1142XR	1	Unit	APBD	2011	Rusak
	▪ Laptop 14 inchi	Thosiba PC W7Starter	4	Unit	APBD	2010	Rusak
	▪ Note Book 11 inchi	Accer AO532h	1	Unit	APBD	2010	Rusak
	▪ Note Book 10 inchi	Thosiba NB305	1	Unit	APBD	2010	Rusak
	▪ Laptop 13 inchi	Accer	3	Unit	APBD	2009	Rusak
	▪ Laptop 14 inchi	Thosiba	2	Unit	APBD	2009	Rusak
	▪ Laptop 14 inchi	Thosiba	1	Unit	APBD	2008	Rusak
	▪ Laptop 13 inchi	Thosiba	1	Unit	APBD	2008	Rusak
5.	PRINTER						
	▪ Printer Besar	Epson	1	Unit	APBD	2020	Baik
	▪ Printer	Epson	4	Unit	APBD	2020	Baik
	▪ Printer	Epson L120	1	Unit	APBD	2019	Baik
	▪ Printer	Epson L565	2	Unit	APBD	2019	Baik
	▪ Printer	Epson L360	5	Unit	APBD	2018	Baik
	▪ Printer	Epson L120	5	Unit	APBD	2016	Baik
	▪ Printer Laser Jet	Brother	1	Unit	APBD	2013	Rusak
	▪ Printer ink Jet	Epson L110	10	Unit	APBD	2013	Rusak
	▪ Printer + Infus	Canon	1	Unit	APBD	2012	Rusak
	▪ Printer + Infus	Canon	4	Unit	APBD	2012	Rusak
	▪ Printer Ink Jet	Epson L100	2	Unit	APBD	2011	Rusak
	▪ Printer Ink Jet + Infus	Canon MP258	4	Unit	APBD	2011	Rusak
	▪ Printer Ink Jet + Infus	Canon Pixma i2770	4	Unit	APBD	2011	Rusak
	▪ Printer Ink Jet	Canon Pixma i2770	2	Unit	APBD	2010	Rusak
	▪ Printer	Epson LQ	1	Unit	APBD	2011	Rusak
	▪ Printer Ink Jet + Infus	Canon	4	Unit	APBD	2011	Rusak

		MP258					
	▪ Printer Ink Jet + Infus	Canon iP2770	2	Unit	APBD	2010	Rusak
	▪ Printer Ink Jet + Infus	Canon iP2770	2	Unit	APBD	2010	Rusak
	▪ Printer Laser Jet	HP	2	Unit	APBD	2010	Rusak
	▪ Printer Ink Jet	HP	3	Unit	APBD	2010	Rusak
	▪ Printer	Epson LQ	2	Unit	APBD	2011	Rusak
6.	Printer Laser Jet	Brothers MFC-8380 DN	1	Unit	APBD	2011	Rusak
7.	MESIN SCANNER	Accers	1	Unit	APBD	2007	Rusak
8.	MESIN PENGHANCUR KERTAS		1	Unit	APBD	2013	Baik
9.	MEJA KERJA						
	▪ Meja Kerja ½ Biro		11	Unit	APBD	2022	Baik
	▪ Meja Komputer		5	Unit	APBD	2022	Baik
	▪ Meja Kerja		3	Unit	APBD	2021	Baik
	▪ Meja Kerja		1	Unit	APBD	2020	Baik
	▪ Meja Receptionist		1	Unit	APBD	2019	Baik
	▪ Meja Kerja		5	Unit	APBD	2019	Baik
	▪ Meja operator	Kayu	1	Unit	APBD	2018	Baik
	▪ Meja kerja Setengah Biro	Kayu	1	Unit	APBD	2018	Baik
	▪ Meja Kerja 1 Biro	Kayu	2	Unit	APBD	2013	Baik
	▪ Meja Komputer	CD-110	1	Buah	APBD	2013	Baik
	▪ Meja Kerja ½ Biro + Kaca		9	Unit	APBD	2012	Baik
	▪ Meja Kerja ½ Biro 2 Laci		1	Unit	APBD	2012	Baik
	▪ Meja Kerja Staf		2	Unit	APBD	2012	Baik
	▪ Meja TV		1	Unit	APBD	2012	Baik
	▪ Meja Kerja 1 Biro	Uk. 120 x 80 x 40 cm	5	Unit	APBD	2010	Baik
	▪ Meja Kerja 1 Biro	Uk. 120 x 80 x 40 cm	5	Unit	APBD	2007	Baik
	▪ Meja Kerja ½ Biro + Kaca	Uk. 90 x 80 x 25 cm	2	Set	APBD	2010	Baik
	▪ Meja Kerja ½ Biro	Uk. 90 x 80 x 25 cm	2	Unit	APBD	2010	Baik
	▪ Meja Kerja Staf	Uk. 80 x 60 x 25 cm	2	Unit	APBD	2010	Baik
	▪ Meja Absen	Uk. 80 x 60 x 40 cm	2	Unit	APBD	2009	Baik
	▪ Meja Komputer		10	Unit	APBD	2008	Baik
	▪ Meja Telepon/PABX	Uk. 40 x 20 x 30 cm	1	Unit	APBD	2008	Baik
10.	MEJA & KURSI SOFA						

	▪ Sofa		1	Set	APBD	2022	Baik
	▪ Kursi Tunggu Stanles		2	Unit	APBD	2021	Baik
	▪ Sofa		1	Set	APBD	2021	Baik
	▪ Kursi dan Meja Tamu	Bahan Kayu & Kaca	1	Set	APBD	2010	Baik
	▪ Kursi dan Meja Tamu	Bahan Kayu & Kaca	1	Set	APBD	2009	Baik
	▪ Kursi dan Meja Tamu	Bahan Kayu & Kaca	1	Set	APBD	2008	Baik
	▪ Kursi Panjang Tunggu	Futura	2	Set	APBD	2009	Baik
	▪ Kursi Panjang Tunggu	Bahan Kayu	3	Buah	APBD	2008	Baik
11.	MEJA RAPAT & PODIUM						
	▪ Meja Rapat Besar		1	unit	APBD	2020	
	▪ Meja Rapat Ruang Rapat	Triplek lapis HPL	1	unit	APBD	2013	Baik
	▪ Meja Rapat Ruang Aula	Kayu	2	Unit	APBD	2013	Baik
	▪ Meja Rapat Panjang	Uk. 180 x 80 x 40 cm	8	Unit	APBD	2007	Baik
	▪ Meja Rapat Bulat	Uk. 90 x 80 x 40 cm	2	Unit	APBD	2007	Baik
	▪ Podium Sambutan Segitiga	Lambang Pemda	1	Unit	APBD	2010	Baik
	▪ Podium Sambutan Segiempat	Non Lambang Pemda	1	Unit	APBD	2008	Baik
12.	KURSI KERJA						
	▪ Kursi Jok Putar Sandaran Tinggi		3	Unit	APBD	2022	Baik
	▪ Kursi Jok Putar Sandaran Tinggi		2	Unit	APBD	2021	Baik
	▪ Kursi Jok Putar Putar		2	Unit	APBD	2019	Baik
	▪ Kursi Jok Putar Sandaran		2	Unit	APBD	2019	Baik
	▪ Kursi Jok Putar Sandaran Tinggi		1	Unit	APBD	2019	Baik
	▪ Kursi jok putar sandaran sedang		3	unit	APBD	2018	Baik
	▪ Kursi Jok Putar Sandaran Sedang		5	Unit	APBD	2012	Baik
	▪ Kursi Jok Putar Sandaran Sedang		4	Unit	APBD	2012	Baik
	▪ Kursi Jok Putar Sandaran Tinggi		2	Unit	APBD	2012	Baik
	▪ Kursi Putar Sandaran Tinggi	Rakuda	1	Buah	APBD	2010	Baik
	▪ Kursi Putar Sandaran Tinggi	Babyku	5	Buah	APBD	2010	Baik
	▪ Kursi Putar Sandaran Tinggi	Futura	3	Buah	APBD	2010	Baik
	▪ Kursi Putar Sandaran Sedang	Ekectra	6	Buah	APBD	2010	Baik
	▪ Kursi Putar Sandaran Rendah	Ekectra	6	Buah	APBD	2010	Baik

	▪ Kursi Putar Sandaran Rendah	Tanpa sandaran tangan	6	Buah	APBD	2010	Baik
	▪ Kursi Kayu sandaran tangan			Buah	APBD	2010	Baik
	▪ Kursi Kayu	Tanpa sandaran tangan		Buah	APBD	2010	Baik
13.	KURSI RAPAT						
	▪ Kursi Rapat		50	Unit	APBD	2022	Baik
	▪ Kursi Kerja Putar		2	Unit	APBD	2020	Baik
	▪ Kursi Rapat		56	Unit	APBD	2019	Baik
	▪ Kursi Jok Putar Sandaran Tinggi		1	Unit	APBD	2013	Baik
	▪ Kursi Jok Putar Sandaran Sedang		9	Unit	APBD	2013	Baik
	▪ Kursi Rapat Sandaran Tinggi	Ascarwood	1	Unit	APBD	2013	Baik
	▪ Kursi Susun Stanllis		15	Buah	APBD	2013	Baik
	▪ Kursi Stenlis Ruang Tunggu		1	Buah	APBD	2013	Baik
	▪ Kursi Susun Stenllis	Rakuda	50	Buah	APBD	2011	Baik
	▪ Kursi Plastik		40	Buah	APBD	2011	Baik
	▪ Kursi Plastik		1	Buah	APBD	2008	Rusak
	▪ Kursi Lipat Stenllis	Rakuda	1	Buah	APBD	2007	Baik
14.	ALMARI						
	▪ Lemari Pakain		7	Unit	APBD	2022	Baik
	▪ Bed Susun + Kasur		7	Unit	APBD	2021	Baik
	▪ Almar Arsip	Kayu	2	Unit	APBD	2013	Baik
	▪ Almari Arsip Data Perusahaan		2	Unit	APBD	2012	Baik
	▪ Lemari Arsip Dinding 5 Tingkat		1	Buah	APBD	2010	Baik
	▪ Lemari Arsip 4 Tingkat		1	Buah	APBD	2010	Baik
	▪ Lemari Arsip 3 Tingkat		1	Buah	APBD	2010	Baik
	▪ Lemari Arsip 2 Tingkat		1	Buah	APBD	2010	Baik
	▪ Lemari Arsip Kaca 2 Pintu		1	Buah	APBD	2009	Baik
	▪ Lemari Pakaian 2 Pintu		2	Buah	APBD	2008	Baik
	▪ Lemari Arsip Gantung	3 pintu, bahan kayu	2	Buah	APBD	2009	Baik
	▪ Lemari Arsip Besi	2 pintu, 4 tingkat	10	Buah	APBD	2006	Baik
15.	FILLING KABINET						
	▪ Lemari Filling Kabinet	Lion	1	Unit	APBD	2021	Baik
	▪ Lemari Filling Kabinet	Lion	5	Unit	APBD	2019	Baik
	▪ Lemari Arsip Filling Kabinet	Lion Slidding Door	2	Unit	APBD	2018	Baik
	▪ Lemari Arsip Filling Kabinet	Lion Slidding	2	Unit	APBD	2012	Baik

		Door					
	▪ Lemari Filling Kabinet	Lion Sliding Door	2	Unit	APBD	2011	Baik
	▪ Lemari Filling Kabinet	Lion Sliding Door	2	Unit	APBD	2010	Baik
	▪ Filling Kabinet 4 Tingkat	Lion	2	Unit	APBD	2009	Baik
	▪ Filling Kabinet 4 Tingkat	Lion	2	Unit	APBD	2009	Baik
	▪ Lemari Filling Kabinet	Lion buka tutup	2	Unit	APBD	2010	Baik
16.	RAK BUKU / TV / KEMBANG						
	▪ Rak Gudang Bansos	Kayu, 4 Tingkat	1	Buah	APBD	2011	Baik
	▪ Rak Buku	Kaca, & Kayu	3	Buah	APBD	2009	Baik
	▪ Rak TV	Kaca, & Kayu	3	Buah	APBD	2008	Baik
	▪ Rak Etalase	Kaca, 3 Tingkat	1	Buah	APBD	2006	Baik
17.	PAPAN INFORMASI / TRAFIC LIGHT / RAMBU-RAMBU						
	▪ Mesin Absensi		1	Buah	APBD	2019	Rusak Ringan
	▪ Runing Text	Uk P 4 m L 50 Cm	1	Buah	APBD	2013	Baik
	▪ Papan Info Data		1	Buah	APBD	2013	Baik
	▪ Data Info Data PPKS		1	Buah	APBD	2013	Baik
	▪ Papan Data Pemulangan orang terlantar & Struktur Organisasi Bidang Rehsos	Uk.P.245 cm L.104 cm	1	Unit	APBD	2012	Baik
	▪ Papan Rekapitulasi Kejadian Bencana	Uk.P.245 cm L.104 cm	1	Unit	APBD	2012	Baik
	▪ Papan Data Kelembagaan Kessos & PPKS	Uk.P.245 cm L.104 cm	1	Unit	APBD	2012	Baik
	▪ Papan Data Rawan resiko Bencana	P 245 cm, L.104 cm	1	Unit	APBD	2012	Baik
	▪ Papan Merk Ruangan	Uk. 32 x 8 cm	20	Buah	APBD	2010	Baik
	▪ Papan Data Kegiatan	Uk. 105 x 62 cm	4	Buah	APBD	2010	Baik
	▪ Papan Daftar Urut Kepangkatan	Uk. 245 x	4	Buah	APBD	2010	Baik

		104 cm					
	▪ Papan Struktur Organisasi	Uk. 245 x 104 cm	1	Buah	APBD	2010	Baik
	▪ Papan Visi Misi & Tupoksi OPD	Uk. 245 x 104 cm	1	Buah	APBD	2010	Baik
	▪ Papan Kegiatan Bergambar	Uk. 200 x 178 cm	1	Buah	APBD	2010	Baik
	▪ Papan Kehadiran Pejabat	Uk. 68 x 54 cm	4	Buah	APBD	2010	Baik
	▪ Papan Tulis White Board	Uk. 245 x 104 cm	1	Buah	APBD	2009	Baik
	▪ Papan Tulis White Board	Uk. 105 x 62 cm	1	Buah	APBD	2008	Baik
	▪ Papan Data Lowongan Kerja	Uk. 200 x 178 cm	1	Buah	APBD	2007	Baik
	▪ Papan Merk Sekretariat DWP	Uk. 105 x 62 cm	2	Unit	APBD	2007	Baik
	▪ Papan Merk Sekretariat LK3	Uk. 105 x 62 cm	2	Unit	APBD	2007	Baik
	▪ Papan Merk Sekr. TAGANA	Uk. 105 x 62 cm	2	Unit	APBD	2007	Baik
V.2.	ALAT – ALAT RUMAH TANGGA						
18.	AIR CONDITIONER (AC)						
	▪ AC 1 PK		1	Unit	APBD	2022	Baik
	▪ AC 1 PK		12	Unit	APBD	2021	Baik
	▪ AC 1 PK	Aux	4	Unit	APBD	2020	Baik
	▪ AC Stand 3 PK	AUX	1	Unit	APBD	2020	Baik
	▪ AC Stand 2 PK	AUX	1	Unit	APBD	2019	Baik
	▪ AC 1 PK	Gree	5	Unit	APBD	2013	Baik
	▪ AC 1 PK	Gree	3	Unit	APBD	2012	Baik
	▪ AC 1 ½ PK	LG	2	Unit	APBD	2010	Baik
	▪ AC 1 PK	Panasonic	3	Unit	APBD	2010	Baik
19.	KIPAS ANGIN						
	▪ Kipas Angin Turbo		1	unit	APBD	2021	Baik
	▪ Kipas Angin		5	unit	APBD	2019	Baik
	▪ Sound system Aula	Sapphoro	1	Paket	APBD	2018	Baik
	▪ Kipas angin blower	Sakai	2	unit	APBD	2018	Baik
	▪ Kipas angin blower	Sakai	2	unit	APBD	2017	Baik
	▪ Kipas Angin Gantung + Pasang	GMC Tipe :BM-505	4	Unit	APBD	2012	Baik
	▪ Kipas Angin Putar Dinding	Nasional	7	Unit	APBD	2008	Baik
	▪ Kipas Angin Putar Tegak	Panasonic	3	Unit	APBD	2007	Baik
20.	EXHAUSFHANT						
	▪ Exhaustfant	Panasonic	3	Buah	APBD	2013	Baik

	▪ Exhaustifant Ukuran Sedang	Maspion	1	Unit	APBD	2010	Baik
	▪ Exhaustifant Ukuran Kecil	Maspion	1	Unit	APBD	2008	Baik
21.	TANGGA STENLLIS	Fortune, 4 Tingkat	1	Unit	APBD	2011	Baik
22.	KARPET/AMBAL						
	▪ Karpet	Jumbo	4	Buah	APBD	2020	Baik
	▪ Karpet Ruangan	Nobel	20	Meter	APBD	2013	Baik
	▪ Karpet / Ambal Sholat	Uk. P 2-4 meter L.50-80 cm	1	Unit	APBD	2012	Baik
	▪ Karpet / Ambal Shalat	Uk.P 2-4 meter L. 1-2 m	1	Unit	APBD	2012	Baik
	▪ Sajadah Shalat		1	Unit	APBD	2012	Baik
	▪ Karpet/ Ambal	Samirah, 4 x 3 m	12	Meter	APBD	2007	Baik
23.	KULKAS 1 PINTU	Sanyo SR-D166SB	1	Unit	APBD	2011	Baik
24.	LEMARI PIRING	Bahan Kaca 2 Tingkat	1	Unit	APBD	2010	Baik
25.	DISPENSER						
	▪ Lemari Es		1	Buah	APBD	2021	Baik
	▪ Dispenser	Miyako	2	Buah	APBD	2020	Baik
	▪ Dispenser Hot Cold	Modena	1	Buah	APBD	2018	Baik
	▪ Dispenser Hot Cold	Maspion	2	Buah	APBD	2010	Baik
	▪ Dispenser Standar	Nasional	2	Buah	APBD	2009	Baik
	▪ Dispenser Standar	Maspion	3	Buah	APBD	2008	Baik
26.	PERALATAN DAPUR						
	▪ Kitchen set		1	Buah	APBD	2021	Baik
	▪ Rak Piring		1	Buah	APBD	2021	Baik
	▪ Pring Makan	Kaca	4	Lusin	APBD	2013	Baik
	▪ Gelas Makan	Kaca	4	Lusin	APBD	2013	Baik
	▪ Sendok Makan	Stenslis Stell	4	Lusin	APBD	2013	Baik
	▪ Mangkok Sedang	Kaca	3	Buah	APBD	2013	Baik
	▪ Sendok Gulai	Stenslis Stell	3	Buah	APBD	2013	Baik
	▪ Sendok Garpu		3	Lusin	APBD	2013	Baik
	▪ Piring Tempat Lauk Prasmanan	Kaca	4	Buah	APBD	2013	Baik
	▪ Gelas HS + Tutup		4	Lusin	APBD	2013	Baik
	▪ Gelas Makan	HS	1	Lusin	APBD	2011	Baik
	▪ Gelas Polos	Indones	1	Lusin	APBD	2011	Baik
	▪ Garpu Makan	Stenllis Doll	1	Lusin	APBD	2011	Baik
	▪ Sendok Makan	Stenllis Doll	1	Lusin	APBD	2011	Baik
	▪ Piring Makan Besar	HS	1	Lusin	APBD	2011	Baik

	▪ Piring Makan Cekung	Sango	1	Lusin	APBD	2011	Baik
	▪ Kobokan Cuci Tangan	Indones	1	Lusin	APBD	2011	Baik
	▪ Toples Gula/Kopi/The	High Wire	1	Set	APBD	2011	Baik
	▪ Cangkir Minuman The	Vicenza	2	Set	APBD	2010	Baik
	▪ Cerek Stenllis	Maspion	1	Buah	APBD	2010	Baik
	▪ Kompor Gas	Rinai 2 Sumbu	1	Buah	APBD	2010	Baik
	▪ Tabung Gas	Elpiji Netto 12 Kg	1	Buah	APBD	2010	Baik
27.	MEJA LAPANGAN OLAHRAGA TENIS MEJA		1	Buah	APBD	2008	APBD
	Meja Pingpong		3	Buah	APBD	2021	APBD
28.	HORDENG & ALAS MEJA						
	▪ Horden		1	Paket	APBD	2021	Baik
	▪ Hordeng dan Rimpel Meja		1	Paket	APBD	2020	Baik
	▪ Hordeng ruang kasubag umum	Coklat tua	1	Buah	APBD	2018	Baik
	▪ Rimpel alas meja	Coklat muda,coklat tua	5	Buah	APBD	2018	Baik
	▪ Hordeng aula	Coklat tua, coklat muda, putih	6	Buah	APBD	2017	Baik
	▪ Hordeng ruang kadis dan sekretaris	Hijau muda dan putih, coklat tua dan putih	2	Buah	APBD	2017	Baik
	▪ Hordeng	Buka Tutup, Cream	122	Meter	APBD	2011	Baik
	▪ Rimpel Alas Meja	Saten, Biru & Merah	5	Buah	APBD	2011	Baik
29.	▪ Bendera dan Umbul-umbul Kantor	Merah,putih, kuning, hijau,	1	Paket	APBD	2018	Baik
	▪ Bendera Merah Putih		3	Buah	APBD	2013	Baik
30.	LAMBANG-LAMBANG NKRI						
	▪ Lambang Burung Garuda	Bahan Lilin, Perunggu	6	Buah	APBD	2010	Baik
	▪ Gambar Presiden/Wapres RI	Bingkai Kaca	8	Set	APBD	2010	Baik

Tabel. 8

DAFTAR ALAT-ALAT STUDIO DAN ALAT-ALAT KOMUNIKASI,
ALAT-ALAT KEDOKTERAN, ALAT-ALAT LABORATORIUM DAN ALAT-
ALAT KEAMANAN

Menurut Jenis Golongan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Pada OPD Dinas Sosial Kota Jambi
Periode s/d Desember Tahun 2022

No	URAIAN JENIS ASET	Merk / Tipe / Spesifikasi	Kuantitas	Satuan Ukuran	Sumber Dana (APBD / APBN)	Tahun	Kondisi (Baik / Rusak / Rusak Berat)
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. 1	ALAT-ALAT STUDIO						
1.	TELEVISI (TV)						
	▪ Televisi	Led	1	Unit	APBD	2021	Baik
	▪ Televisi		4	Unit	APBD	2020	Baik
	▪ Televisi 21 Inci Layar Datar	LG 21SL1RD-T3	1	Unit	APBD	2011	Baik
	▪ Televisi 21 Inci Layar Datar	Panasonic	1	Unit	APBD	2009	Baik
	▪ Televisi 21 Inci Layar Cembung	Panasonic	1	Unit	APBD	2008	Baik
	▪ Antena Booster	Tanaka	3	Buah	APBD	2011	Baik
	▪ Booster	PC Goceng	3	Buah	APBD	2011	Baik
2.	HANDYCAM						
	▪ Handycam	Sony DCR-SX 40E	1	Unit	APBD	2010	Baik
	▪ Handycam	Sony	1	Unit	APBD	2009	Baik
3.	CAMERA						
	Camera Miroress	Canon	1	Unit	APBD	2018	Baik
	Camera Digital	Sonny DSC-W620	1	Unit	APBD	2013	Rusak
	Camera Digital	Canon 12 MP	1	Unit	APBD	2012	Rusak
	Camera Digital	Canon 14 MP	1	Unit	APBD	2012	Rusak
	Camera Digital	Sony	1	Unit	APBD	2012	Rusak
	Camera	Canon	1	Unit	APBD	2012	Rusak
	Camera Digital	Sony 10 MP	1	Unit	APBD	2010	Rusak
	Camera Digital	Samsung 8 MP	2	Unit	APBD	2009	Rusak
	Camera Digital	Cybershot DSC-S930	1	Unit	APBD	2008	Rusak
	Camera Digital	Kodak	2	Unit	APBD	2007	Rusak

2							
1.	TELEPHONE	Panasonic	1	Buah	APBD	2009	Baik
2.	TELEPHONE/ JARINGAN PABX						
	Jaringan Telephone PABX		1	Paket	APBD	2012	Baik
	Telephone PABX	Panasonic	4	Buah	APBD	2009	Baik
3.	FAXIMILE	Panasonic	1	Buah	APBD	2008	Baik
4.	HANDY TALKIE	Firtscom	3	Unit	APBD	2013	Baik
VII.	ALAT-ALAT KEDOKTERAN		-	-	-	-	-
VIII.	ALAT-ALAT LABORATORIUM		-	-	-	-	-
IX.	ALAT-ALAT KEAMANAN						
	▪ CCTV	HIKVISION Turbo HD 1080p	1	Paket	APBD	2021	Baik
	▪ Tabung Pemadam Kebakaran	ABC Powder, Fire Extinguisher	9	Unit	APBD	2021	Baik
	▪ CCTV COVR 16 CH lengkap HD 2 Tera		1	Paket	APBD	2019	Baik
	▪ Tabung Pemadam Kebakaran	ABC Powder, Fire Extinguisher	2	Unit	APBD	2013	Baik
	▪ Tabung Pemadam Kebakaran	ABC Powder	4	Unit	APBD	2012	Baik
	▪ Tabung Pemadam Kebakaran	ABC Powder, Racun Api	4	Tabung	APBD	2011	Baik
	▪ Brankas	Lion	1	Unit	APBD	2011	Baik

Tabel. 9

DAFTAR PENGADAAN GEDUNG & BANGUNAN, JALAN IRIGASI & JARINGAN

Menurut Jenis Golongan Aset Tetap

Pada OPD Dinas Sosial Kota Jambi

Periode s/d Desember Tahun 2022

No	URAIAN JENIS ASET	Merk / Tipe / Spesifikasi	Kuantitas	Satuan Ukuran	Sumber Dana (APBD / APBN)	Tahun	Kondisi (Baik / Rusak / Rusak Berat)
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	PENGADAAN BANGUNAN	GEDUNG &					
1.	Interior	Ruang Kadis	1	Unit	APBD	2022	Baik
2.	Interior	Ruang Pelayanan	1	Unit	APBD	2021	Baik
3.	Pos satpam	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	2021	Baik

4.	Gedung PPKS Lantai 2	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	2017	Baik
5.	Gedung PPKS Lantai 1	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	2016	Baik
6.	Tempat Parkir Kendaraan Roda 4	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	2013	Baik
7.	Gudang Bansos 2 Lantai	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	2011	Baik
8.	Pagar Kantor	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	2011	Baik
.	Gudang Bansos	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	2009	Baik
12.	Gedung DWP	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	2009	Baik
13.	Gedung LK3	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	2009	Baik
14.	Tempat Parkir Kendaraan Roda 4	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	2004	Baik
15.	Gedung Aula	Konstruksi Beton	1	Unit	APBN	2002	Baik
16.	Gedung Bina Latihan Kerja	Konstruksi Beton	1	Unit	APBN	2002	Rusak Ringan
17	Gedung Ruang Bidang PTKHI	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	2001	Baik
18	Gedung Sekretariat	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	1998	Baik
19	Gedung Kantor	Konstruksi Beton	1	Unit	APBD	1998	Rusak Berat
B.	JALAN IRIGASI & JARINGAN						
1.	Daya Instalasi & Jaringan Listrik	Konstruksi & Jasa	23.000	Watt	APBD	2010	Baik
2.	Daya Instalasi & Jaringan Listrik	Konstruksi & Jasa	3.300	Watt	APBD	2013	Baik

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

2.3.1 JENIS PELAYANAN OPD

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial merupakan salah satu pelayanan yang diberikan pemerintah Kota Jambi dalam upaya membangun masyarakat. Dalam pelaksanaannya pelayanan dibagi menurut 2 (dua) Urusan sebagai berikut :

1. Urusan Sosial terdiri dari:

a) Pelayanan bidang Perlindungan Jaminan sosial dan warga Negara migran yaitu:

- 1) Perlindungan jaminan sosial penanganan fakir miskin yang meliputi antara lain : Melaksanakan bimbingan teknis verifikasi validasi data dan informasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Reaktifasi dan Pengusulan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (PBI JKN KIS), Pengusulan Jaminan Kesehatan Provinsi Jambi , dan Rekomendasi Jambi Bugar

serta Rekomendasi SKTM Ke RS Raden Mataher Provinsi Jambi.

- 2) Bantuan masyarakat dan warga Negara migran yang meliputi antara lain : Melaksanakan penyuluhan, bimbingan teknis dan pelatihan Usaha Kesejahteraan sosial, Pelayanan Permasalahan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal.
 - 3) Perlindungan jaminan sosial anak terlantar yang meliputi antara lain :Melaksanakan Pemeliharaan, penjangkauan dan pemantauan penanganan anak terlantar.
- b) Pelayanan Bidang Rehabilitasi Sosial yaitu:
- 1) Rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, yang meliputi antara lain :
Rehabilitasi sosial terhadap anak dan lanjut usia dan advokasi terhadap korban tindak kekerasan serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) ,pembinaan dan fasilitasi penaggulangan rawan sosial bagi anak, bantuan terhadap panti sosial, asuhan anak, panti jompo dan rumah perlindungan sosial anak, kerjasama dan fasilitasi perlindungan sosial bagi perempuan, anak, remaja, lansia, korban tindak kekerasan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia panti asuhan/jompo, mengadakan gebyar sehari bersma anak ,sosialisasi tentang anak, menginventarisir lembaga pelayanan sosial bagi anak dan lanjut usia, menyiapkan bahan bimbingan dan pelatihan tenaga pelayanan sosial, penghuni panti dan lanjut usia.
Kampanye sosial peduli lansia, penyuluhan dan bimbingan fisik dan mental, bantuan sosial kepada lansia, pembinaan sumber daya manusia dan manajemen serta fasilitasi sarana dan prasarana panti swasta dan pemerintah, pengembangan klien loka bina karya kepada perusahaan atau industri, pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana loka bina karya dan membuat laporan tahunan dan bulanan.
 - 2) Rehabilitasi Tuna sosial yang meliputi antara lain :
Meliputi pembinaan tuna sosial ,fasilitasi, kerjasama, koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial.

Melaksanakan pendataan dan bimbingan mental sosial dan keterampilan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, meliputi gelandangan dan pengemis, anak nakal, anak jalanan, eks narapidana, korban tindak kekerasan, penyandang cacat, wanita tuna susila, korban perdagangan anak dan perempuan, pengidap HIV/AIDS, melaksanakan penertiban dan penanganan masalah penyakit sosial meliputi razia gelandangan dan pengemis dan tuna susila, pembentukan kelompok usaha bersama bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang telah dilakukan pembinaan sosial dan keterampilan serta memberikan bantuan modal kerja, melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi konseling meliputi penyuluhan tuna susila, gelandangan dan pengemis serta penyakit masyarakat lainnya dan rencana usulan bantuan dan rujukan terhadap penyandang masalah Kesos untuk disalurkan kepada perusahaan atau industri dan lembaga pelayanan sosial dan membuat laporan tahunan dan bulanan.

3) Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas dan korban NAPZA yang meliputi antara lain :

Meliputi pembinaan rehabilitasi penyandang cacat, korban NAPZA, fasilitasi, kerjasama, koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang Disabilitas dan korban NAPZA. Menyusun instrument pendataan serta menghimpun pedoman dan petunjuk teknis penanganan anak nakal dan korban narkoba, bimbingan dan keterampilan pembinaan lanjut terhadap anak nakal. Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan, dampak penyalahgunaan serta penanganan pengguna narkoba, HIV/AIDS melalui media massa, kalender, leaflet, penyuluhan di sekolah-sekolah kepada guru dan kepala sekolah serta ibu-ibu pengajian dan membuat laporan tahunan dan bulanan.

c) Pelayanan bidang Pemberdayaan sosial yaitu:

1) Pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, yang meliputi antara lain :

Memberikan bimbingan teknis dan supervisi pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, Lembaga Konsultasi

Kesejahteraan Keluarga (LK3), serta Penguatan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Melaksanakan validasi dan terminasi, seleksi dan verifikasi. Kemitraan penyaluran bantuan sosial, kepesertaan dan pendampingan sumber daya jaminan sosial keluarga yaitu operator ,koordinator dan pendamping PKH (program Keluarga Harapan).

- 2) Kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial, yang meliputi antara lain :

Pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan (K3) dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, pendataan perintis dan keluarga perintis kemerdekaan, mengusul kan penganugerahan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan, penyelenggaraan peringatan hari pahlawan dan kesetiakawanan sosial nasional dan membuat laporan tahunan dan bulanan.

- 3) Pengelolaan sumber dana bantuan sosial yang meliputi antara lain :

sosialisasi tata cara pengumpulan sumbangan sosial uang dan barang dan pelaksanaan undian gratis berhadiah dan membuat laporan tahunan dan bulanan.

- d) Pelayanan bidang Penanganan Bencana yaitu:

- 1) Perlindungan sosial korban bencana alam, yang meliputi antara lain :

Melaksanakan kesiapsiagaan dan mitigasi , penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistic bencana, sosialisasi pedoman dan petunjuk teknis tentang penanggulangan bencana, mendata lokasi rawan bencana, membentuk taruna siaga bencana (TAGANA) dan mengevakuasi korban bencana, pembinaan, sosialisasi, pelatihan keterampilan korban bencana, pendataan dan identifikasi korban bencana serta penyaluran bantuan, menghimpun bantuan masyarakat dan menyusun rencana penyaluran terhadap korban bencana, dan membuat laporan tahunan dan bulanan.

- 4) Perlindungan sosial korban bencana sosial, yang meliputi antara lain :

Penanganan korban bencana sosial, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial berupa meneruskan perjalanan orang terlantar dalam perjalanan ke tempat tujuannya dan membuat laporan tahunan dan bulanan.

Untuk membantu kelancaran Pelayanan Urusan Sosial sebagaimana dimaksud diatas dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Kota Jambi didukung dan dibantu oleh :

2. Urusan Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari:

a) Pelayanan Perencanaan, yang meliputi antara lain :

Melaksanakan mengolah dan merangkum usulan program dari sekretariat dan masing-masing bidang dan membuat laporan berkala dan tahunan.

b) Pelayanan Administrasi Keuangan, yang meliputi antara lain :

Melaksanakan ketatausahaan urusan keuangan pengeluaran dan pendapatan, pembukuan, pembendaharaan dan kas, serta penyelenggaraan administrasi keuangan dan membuat laporan tahunan dan bulanan..

c) Pelayanan Urusan Umum dan Kepegawaian, yang meliputi antara lain :

Menyiapkan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahaan dan hubungan masyarakat, mengagendakan, mengarsipkan dan mendistribusikan surat-menyurat, melaksanakan administrasi dan surat menyurat kendaraan dinas, melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang, mempersiapkan penyelenggaraan rapat , penerimaan tamu dan kelancaran hubungan melalui alat-alat komunikasi mengusulkan, mengolah data dan dokumentasi pegawai meliputi kenaikan pangkat, permohonan izin dan tugas belajar, cuti perpindahan, pemberian tanda penghargaan/ tanda jasa dan sanksi, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji berkala, dan tunjangan, merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidik dan pelatihan, serta calon peserta ujian dinas pegawai, menyusun daftar urut kepangkatan (DUK), mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu istri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun, dan kartu asuransi kesehatan, menyiapkan dan memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai dan laporan

pajak-pajak pribadi (LP2P) serta mengolah absensi atau daftar hadir pegawai dan membuat laporan tahunan dan bulanan.

TABEL T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kota Jambi

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-								Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah dan Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	A	-	B (65)	B (70)	BB (72)	BB (75)	BB (80)	A (82)	A (84)	A (85)	B (	B (	BB (70,17)	BB (72,04)	BB (75,60)			97,5	96,1	94,5
2	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menangani PPKS	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
3	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
4	Persentase Rehabilitasi Sosial yang di Layani	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
5	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS Terlayani	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
6	Persentase Penanganan Bencana saat Tanggap Darurat	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1

Kepala Dinas Sosial Kota Jambi



YUNITA INDRAWATI, AP, MP, CGCAE
NIP. 197406071994032002

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang ada realisasi capaiannya telah mencapai dari target. Adapun secara keseluruhan dari 6 indikator kinerja semua telah tercapai. Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

TABEL T-C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial

Kota Jambi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-								Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA OPERASI	9.586.957.344	7.953.195.711	10.009.542.435	18.412.964.502	11.891.068.465	12.604.447.079	-	-	8.372.818.362	7.548.638.352	9.448.777.466	11.306.845.911	11.205.003.490	87,34	94,91	94,4	61,41	94,23	0,12	0,12
1. Belanja Pegawai	4.330.057.344	3.507.422.461	4.085.588.819	4.536.259.143	4.404.246.905	5.045.321.385	-	-	3.448.572.184	3.310.599.640	4.028.222.143	4.386.740.376	4.219.250.211	79,64	94,39	98,6	96,7	95,8	0,02	0,09
2. Belanja Barang dan Jasa	5.113.500.000	4.245.473.250	5.923.953.616	13.876.705.359	5.523.341.560	5.160.528.694	-	-	4.781.520.278	4.038.738.712	5.420.555.323	6.920.105.535	5.251.620.489	93,51	95,13	91,5	49,87	95,08	0,25	0,15
3. Belanja Modal	143.400.000	200.300.000	1.211.663.081	586.710.555	498.040.722	165.333.921	-	-	142.725.900	199.300.000	1.121.788.250	546.526.800	471.624.455	99,53	99,5	92,58	93,15	94,7	1,13	1,5
Total Anggaran	9.586.957.344	7.953.195.711	11.221.205.516	18.999.675.057	12.389.109.187	12.769.781.000	-	-	8.372.818.362	7.548.638.352	10.570.565.716	11.853.372.711	11.676.627.945	87,34	94,91	94,2	62,39	94,24	0,12	0,14

Rasio antara realisasi dan anggaran selama periode 2019-2023 dapat dikatakan baik. Pada Tahun 2019 Realisasi anggaran cukup baik dengan persentase 87,34 Persen dari total anggaran yang ada. untuk tahun 2020 dan 2021 realisasi anggaran mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 94,91 % dan 94,20 %. Pada Tahun 2022 mengalami realisasi anggaran yang turun menjadi 62,39 % dimana ada

Program Yang tidak biasa dijalankan terkait waktu yang mana dana insentif daerah di dapat pada akhir tahun 2022 terkait bantuan sosial yang Anggaran Besar tidak bisa kami realisasikan sehingga persentase realisasi penyerapan anggaran pada dinas sosial turun menjadi 62,39 %.

2.3.2 Tingkat Kinerja Pelayanan Opd Periode Sebelumnya

Dinas Sosial Kota Jambi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah adalah instansi yang diberi kewenangan secara teknis untuk menangani dan mengelola bidang Sosial juga sebagai salah satu fungsi pelayanan kepada masyarakat di Kota Jambi. Dari program dan kegiatan yang telah dilakukan dibidang Sosial tahun dapat disimpulkan indicator keberhasilan dalam rangka peningkatan penanganan dan pelayanan Masalah-Masalah Sosial antara lain :

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- 2) Meningkatnya pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya.
- 3) Meningkatnya kualitas hidup bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya bangsa
- 4) Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial
- 5) Meningkatnya pelayanan bagi korban bencana
- 6) Meningkatnya prakarsa dan peran aktif masyarakat melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terdiri dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Tagana, TKSK, PSM, Pendamping PKH, Karang Taruna, LK3, K3S termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

2.3.3 Potensi Dan Permasalahan Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelayanan Opd

Indonesia adalah sebuah negara di mana Konstitusi negara yakni UUD 1945 mewajibkan pemerintah membangun sebuah sistem kesejahteraan yang universal. Tetapi berdasarkan pengalaman negara-negara maju yang menganut ideologi 'negara kesejahteraan' atau 'welfare state', menyerahkan sepenuhnya kepada Negara untuk urusan sosial security system bagi seluruh warga Negara lama-kelamaan membebani keuangan Negara dan Masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial pada level individu, keluarga atau komunitas/masyarakat. Dari berbagai sudut pandang dan ukuran apapun, pelayanan sosial bagi PPKS yang dilakukan oleh keluarga dan komunitas/masyarakat adalah yang paling murah biayanya. Oleh karena itu, potensi dan sumber kesejahteraan sosial dimaksud sebagaimana telah diidentifikasi selama ini perlu terus digali dikembangkan dan didayagunakan oleh pelaku pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Potensi dan sumber kesejahteraan sosial memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pada OPD Dinas Sosial Kota Jambi. Integritas dan kompetensi sumber Potensi dan sumber kesejahteraan sosial merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas permasalahan kesejahteraan sosial dan Ketenagakerjaan, maka perlu adanya kemampuan dalam menggerakkan sumber daya dimaksud.

Oleh sebab itu Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang dapat digunakan dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Apabila dapat digali dan dikembangkan, maka PSKS ini dapat mendukung secara berkelanjutan penyelenggaraan kesejahteraan sosial,

Adapun Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang Keberadaannya sangat diharapkan secara fungsional mampu berada pada barisan terdepan di tengah masyarakat untuk dapat membantu melakukan sinkronisasi, keterpaduan, dan koordinasi program Pembangunan untuk menyelesaikan masalah Sosial dimaksud diuraikan di bawah ini :

- 1) Sumber Daya Manusia Pembangunan Kesejahteraan Sosial, yang mencakup antara lain :
 - a) Tenaga kesejahteraan sosial,
 - b) Pekerja sosial profesional,
 - c) Relawan sosial, dan
 - d) Penyuluh sosial
- 2) Pilar Partisipan Usaha Kesejahteraan Sosial yang mencakup antara lain:
 - a) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
 - b) Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S)
 - c) Pendamping , Operator dan Supervisor Program Keluarga Harapan (PKH)
 - d) Karang Taruna (KT)
 - e) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
 - f) Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan supervisor Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)

- g) Taruna Siaga Bencana (Tagana)
 - h) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
 - i) Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)
 - j) Pendamping Asistensi Lanjut Usia (Aslut)
 - k) Pendamping Penyandang Cacat Berat (Panca Berat)
- 3) Sarana dan Prasarana Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang mencakup antara lain :
- a) Rumah Singgah PPKS
 - b) Panti Sosial
 - c) Panti Rehabiltasi Sosial
 - d) Pusat Pendidikan dan Pelatihan
 - e) Pusat Kesejahteraan Sosial
 - f) Rumah Perlindungan Sosial
- 4) Legislasi Kesejahteraan Sosial
- Dalam menjalankan program pembangunan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kota Jambi memiliki payung hukum sebagaimana dituangkan dalam :
- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - b) Undang-Undang Kesejahteraan Anak;
 - c) Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia; dan beberapa
 - d) Undang-undang lain.
- Dengan disahkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009, maka penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial dapat dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
- 5) Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha
- Pembangunan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya Dinas Sosial Kota Jambi, namun juga tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha. Partisipasi dunia usaha dilakukan melalui program corporate sosial responsibility (CSR) yaitu program yang mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan dan pelayanan kesejahteraan sosial.
- 6) Manajemen Pembangunan Kesejahteraan Sosial
- Program pengembangan manajemen kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme lembaga pelayanan kesejahteraan sosial melalui penelitian masalah sosial dan pengembangan alternatif-alternatif intervensi pekerjaan sosial,

penataan sistem dan mekanisme kelembagaan, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

7) Nilai Kesetiakawanan Sosial

Kesetiakawanan sosial atau rasa solidaritas sosial merupakan potensi spiritual, komitmen bersama sekaligus jati diri bangsa. Oleh karena itu, kesetiakawanan sosial merupakan nurani bangsa Indonesia yang tereplikasi dari sikap dan perilaku yang dilandasi pengertian, kesadaran, keyakinan, tanggung jawab, dan partisipasi sosial sesuai dengan kemampuan dari masing-masing warga dengan semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban demi sesama, kegotongroyongan dalam kebersamaan dan kekeluargaan.

Nilai kesetiakawanan sosial tercermin dari sikap mental yang dimiliki seseorang atau suatu komunitas, peka terhadap lingkungan sosialnya sehingga mendorong untuk peduli melakukan perbuatan bagi kepentingan lingkungan sosialnya tersebut.

Esensi kesetiakawanan sosial adalah memberikan yang terbaik bagi orang lain. Tak terkecuali bagi organisasi, lembaga publik dan dunia usaha yang dalam gerak kegiatannya membutuhkan dukungan dari masyarakat. Nilai kesetiakawanan sosial solidaritas sosial, dan kearifan lokal merupakan potensi dan kekuatan Dinas Sosial Kota Jambi dalam menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial.

2.3.4 PERMASALAHAN SOSIAL

Selama kurun waktu 2018 - 2023, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Jambi yang dapat menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja pada masa yang akan mendatang jika tidak segera diberi perhatian seperti konstelasi faktor internal organisasi Dinas Sosial Kota Jambi.

Berdasarkan uraian di atas, inti permasalahan di Bidang Sosial yang sedang dan masih akan dihadapi dalam jangka waktu 2024 - 2026 mendatang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab

ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, ketelantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan. Rendahnya tingkat capaian penurunan angka kemiskinan sebagai akibat:

- a) Kejadian bencana alam (banjir, Kebakaran, Angin Puting Beliung, Tanah Longsor dsb)
- b) Terjadinya krisis ekonomi global, Kenaikan Harga BBM, tingginya kurs nilai tukar dolar terhadap mata uang rupiah yang berdampak terhadap tingginya harga keperluan pada berbagai sektor dan memicu kenaikan harga pada sektor lainnya;
- c) Jumlah PPKS yang dikategorikan sebagai fakir miskin termasuk kategori kemiskinan
- d) Jumlah keluarga fakir miskin akan semakin bertambah mengingat masih adanya kelompok masyarakat yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Rentan (KR).

Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan antara lain :

- a) faktor internal :
 - ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari,
 - ketidakmampuan dalam menampilkan peranan sosial dan
 - ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya
- b) faktor eksternal :
 - kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin;
 - tidak tersedianya pelayanan sosial dasar;
 - tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah;
 - terbatasnya lapangan pekerjaan;
 - belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan, kesenjangan, dan ketidakadilan sosial;
 - dampak pembangunan yang berorientasi kapitalis.

2) Ketelantaran

Ketelantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Oleh sebab itu anak merupakan aset dan generasi

penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu pula lanjut usia perlu dijaga dan diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya.

Masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah adalah bagaimana meningkatkan pelayanan sosial bagi para lanjut usia agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tenteram yang tentu saja melalui usaha pelebagaan para lanjut usia.

3) Kecacatan

Kecacatan diartikan sebagai hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormal fungsi struktur anatomi, psikologi, maupun fisiologi seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga memengaruhi keleluasan aktivitas fisik, kepercayaan, dan harga diri yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain ataupun dengan lingkungan.

Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. Sisi lain dari kecacatan adalah pandangan sebagian orang yang menganggap kecacatan sebagai kutukan, sehingga mereka perlu disembunyikan oleh keluarganya. Perlakuan seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat untuk berkembang dan berkreasi sebagaimana orang-orang yang tidak cacat tidak dapat terpenuhi. Masalah kecacatan akan semakin berat bila disertai dengan masalah kemiskinan, ketelantaran, dan keterasingan.

4) Ketunaan sosial dan Penyimpangan Perilaku

Ketunaan memberi indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri, dan juga kebutuhan religius, rekreasi, dan pendidikan seseorang. Kegagalan seseorang menjalankan fungsi sosialnya menyebabkan seseorang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Indonesia saat ini dihadapkan pada tingginya jumlah mereka yang tergolong sebagai PPKS, seperti korban tindak kekerasan terhadap wanita dan orang tua, gelandangan dan pengemis, tunasusila, eks narapidana dan penyalahgunaan Napza serta penderita HIV/AIDS

2.3.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Pendanaan Pelayanan Opd.

Sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan pelayanan jasa, Kota Jambi tumpuan bagi penduduk untuk menggantungkan hidupnya menuju kehidupan yang lebih baik. Pendetang dari luar daerah pun semakin meningkat, hal ini mengakibatkan bertambahnya penduduk kota sekaligus menambah permasalahan sosial yang semakin semakin kompleks. Ke depan permasalahan ini perlu penanganan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Persoalan kemiskinan merupakan bagian tidak bisa terpisahkan sebagai salah satu dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat, memerlukan perhatian ekstra keras dan penuh dengan kesabaran ekstra tinggi. Oleh Karena itu pemerintah berada pada posisi kunci sebagai pihak yang harus melakukan pengaturan terhadap distribusi dari hasil sumber-sumber ekonomi.

Kedepan kita akan mengupayakan pengembangan program jaminan sosial oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial seperti perhatian terhadap pekerja sekaligus penyuluh sosial baik dari unsur masyarakat maupun pegawai negeri yang saat ini belum maksimal.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dibidang Sosial Kota Jambi perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijaksanaan Program operasional dan kegiatan-kegiatan.

Upaya strategis yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Sosial tidak terlepas dari kondisi yang mendukung kegiatan dan faktor-faktor lain dari kegiatan dimaksud. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan OPD Dinas Sosial Jambi yang meliputi :

1. FAKTOR KEKUATAN

- 1) Potensi sumber daya alam yang masih tersedia yang membuka peluang dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pola pendekatan secara kelompok dalam bentuk KUBE dan peningkatan Usaha Ekonomi Produktif;
- 2) Keterlibatan dan peran serta aktif Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) ditengah – tengah masyarakat & Lembaga masyarakat yang semakin baik dan bekerja sama dalam menangani masalah kesejahteraan sosial seperti yayasan – yayasan, LSM Orsos dan Karang Taruna sesuai fungsi sosialnya

- 3) Pengelolaan Sumber Daya Personil dalam mendukung dan membantu tugas-tugas pelayanan Kesejahteraan sosial (PKH, Tagana, TKSK, PSM)
- 4) Partisipasi dunia usaha dilakukan melalui program corporate sosial responsibility (CSR) dan Perluasan Kesempatan Kerja merupakan implementasikan tanggungjawab & Kepedulian perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan dan pelayanan kesejahteraan sosial & mengatasi pengangguran
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana Kantor yang memadai untuk melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- 6) Telah terbentuknya struktur kelembagaan Dinas Sosial Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 50 tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Sosial kota jambi.

2. FAKTOR KELEMAHAN

- 1) Keterbatasan APBD Kota Jambi belum optimal menyentuh secara menyeluruh terhadap pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Jambi.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana kesejahteraan sosial sehingga pelayanan pada masyarakat kurang optimal (Panti, Rumah Singgah, dsbnya);
- 3) Tingkat kemiskinan penduduk yang relatif tinggi sehingga menimbulkan permasalahan sosial, seperti : Gepeng (gelandangan dan pengemis), Fakir Miskin, Anak terlantar, Anak Jalanan, Korban Narkoba, Korba HIV/AIDS, Keluarga Rentan, Lansia Terlantar & WTS;
- 4) Ketersediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang belum akurat;
- 5) Kurangnya Pemanfaatan Potensi dan sumber daya pembangunan kesejahteraan sosial ;
- 6) Rendahnya Tingkat pendapatan masyarakat yang berdampak luas terhadap masalah sosial lainnya seperti rendahnya semangat kerja, kurang kreatif , mandiri dan kurang percaya diri.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial Kota Jambi

Berdasarkan faktor kekuatan dan kelemahan yang telah dirinci di urusan Sosial diperlukan analisis lingkungan eksternal yang terdiri dari

pelayanan OPD Periode 3 (tiga) Tahun mendatang 2024 - 2026 serta rumusan kebijakan yaitu :

1. Faktor Tantangan

- a) Tingkat kemiskinan penduduk yang relatif tinggi sehingga menimbulkan permasalahan sosial, seperti : Gepeng (gelandangan dan pengemis), Fakir Miskin, Anak terlantar, Anak Jalanan, Disabilitas terlantar, lansia terlantar , Korban Narkoba dan WTS.
- b) Masih kurangnya Partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial SDM bagi penyandang masalah Kessos Relatif kurang, mengembangkan diri sangat tergantung pada Bimbingan dan Pembinaan Pemerintah

2. Faktor Peluang

- a) Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan dan keleluasan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintah secara optimal.
- b) Keterlibatan Lembaga Kesejahteraan Sosial(LKS) ditengah – tengah masyarakat untuk dapat mengatasi dan menanggulangi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- c) Potensi sumber daya alam yang masih tersedia yang membuka peluang dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pola pendekatan secara kelompok dalam bentuk KUBE Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- d) Lembaga masyarakat yang semakin baik dan bekerja sama dalam menangani masalah kesejahteraan sosial seperti Lembaga Kesejahteraan Sosia (LKS)l, LSM Orsos, Tagana, Karang Taruna, PSM dan lain sebagainya.
- e) Meningkatnya mobilitas dan informasi masalah kesejahteraan sosial yang dapat meningkatkan kesetiakawanan sosial di masyarakat

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kota Jambi

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan pelayanan jasa, Kota Jambi tumpuan bagi penduduk untuk menggantungkan hidupnya menuju kehidupan yang lebih baik. Pendatang dari luar daerah pun semakin meningkat, hal ini mengakibatkan bertambahnya penduduk kota sekaligus menambah permasalahan sosial yang semakin semakin kompleks. Ke depan permasalahan ini perlu penanganan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Persoalan kemiskinan merupakan bagian tidak bisa terpisahkan sebagai salah satu dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat, memerlukan perhatian ekstra keras dan penuh dengan kesabaran ekstra tinggi. Karena itu pemerintah berada pada posisi kunci sebagai pihak yang harus melakukan pengaturan terhadap distribusi dari hasil sumber-sumber ekonomi. Kedepan kita akan mengupayakan pengembangan program jaminan sosial dan bursa kerja oleh pemerintah pusat melalui Kementrian

Sosial seperti perhatian terhadap pekerja sekaligus penyuluh sosial baik dari unsur masyarakat maupun pegawai negeri yang saat ini belum maksimal.

Tantangan kedepan yang akan dihadapi Kota Jambi cukup berat dan hal yang paling pokok adalah berkurangnya dana pembangunan yang mampu disediakan oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), ketimpangan antar daerah serta inefisiensi di sektor usaha swasta dan pemerintah. Salah satu hal yang paling mendasar didalam pencapaian solusi tersebut adalah perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance).

Dalam hubungannya dengan Fungsi-fungsi Pembangunan dan Urusan-Urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah maka permasalahan-permasalahan dari isu strategis dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dalam Konteks Fungsi Pelayanan Umum, meliputi :

- 1) Belum optimalnya dalam penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
- 2) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap permasalahan Sosial .
- 3) Terbatasnya kompetensi dan kapasitas Sumber Daya aparatur.
- 4) Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
- 5) Terbatasnya kapasitas dan belum optimalnya alokasi anggaran keuangan untuk melaksanakan program kegiatan .
- 6) Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah.
- 7) Implementasi kebijakan komunikasi dan informasi terhadap permasalahan Sosial belum optimal.
- 8) Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran.

2. Dalam Konteks Fungsi Pelayanan Sosial, yang meliputi :

- 1) Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Gelandangan, Pengemis, Anak Terlantar, PSK) yang dapat mengganggu ketertiban dan Keamanan lingkungan
- 2) Menguatnya gejala perilaku asusila, penyalahgunaan narkoba, pornografi, dan perjudian.
- 3) Terbatasnya SDM serta sarana dan prasarana dalam penanggulangan dan penanganan bencana.

- 4) Belum optimalnya Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- 5) Belum Optimalnya kebijakan, Sinkronisasi dan Koordinasi dalam upaya-upaya penanganan dan penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) .
- 6) Kuantitas ketersediaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mengalami perubahan seiring meningkatnya laju pertumbuhan penduduk .
- 7) Meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- 8) Rendahnya akses ke pelayanan sosial dasar bagi penyandang cacat.
- 9) Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial.
- 10)Rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial.
- 11) Belum Optimalnya Fungsi dan Tugas Kelembagaan Sosial(LKS,LK3, K3S, FK.PSM dan Karang Taruna dalam memerankan fungsinya sebagai agen perubahan sosial.
- 12) Rendahnya keterampilan penduduk miskin.

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Masih Terdapatnya PPKS	Masih terdapat permasalahan sosial	Masih banyaknya masyarakat pendatang yang tidak mempunyai skil dan keahlian
			Masih ditemuinya pengemis di jalan-jalan protokol
			Masih terdapatnya penyalahgunaan Napza
			Masih terdapatnya kasus human Trafficking
2	Bantuan terhadap masyarakat miskin belum tepat sasaran	Belum optimalnya verval data	Data Masyarakat Miskin belum Valid
			Belum Optimalnya keterampilan penduduk miskin
			Masih terdapatnya penduduk di bawah garis kemiskinan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dibidang Sosial Kota Jambi perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijaksanaan Program operasional dan kegiatan-kegiatan.

Upaya strategis yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Sosial tidak terlepas dari kondisi yang mendukung kegiatan dan faktor-faktor lain dari kegiatan dimaksud. Kondisi yang akan diuraikan ini dilakukan melalui beberapa analisis yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal.

3.3.1 Analisis lingkungan internal

1. Kekuatan (Strength)

- a. Stabilitas keamanan daerah yang kondusif dan terjaga dengan baik.
- b. Sinkronisasi dan Koordinasi antara Pemerintah, Kelembagaan Organisasi, Masyarakat dan Pelaku Dunia Usaha dalam mengatasi masalah-masalah Kesejahteraan Sosial
- c. Jumlah aparatur OPD yang jumlahnya relatif cukup memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Peningkatan peran / partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah-masalah Kesejahteraan Sosial .
- e. Tersedianya Anggaran Dana yang bersumber dari APBD Kota Jambi untuk mendukung Program Kegiatan dan Tugas– tugas operasional.
- f. Terbentuknya struktur kelembagaan Dinas Sosial Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi

2. Kelemahan (Weaknesses)

- a. Belum memadainya produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Jambi.
- b. Masih banyaknya penduduk yang berada pada kelompok miskin.
- c. Ketersediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang belum akurat seiring dengan pertumbuhan penduduk.
- d. Belum optimalnya implementasi Standar Pelayanan Minimal Aparatur Pemda yang berdampak pada efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

- e. Belum optimalnya dukungan dan peran serta aktif stakeholders daerah (dunia usaha-masyarakat) dalam pengelolaan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial .
- f. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah berdampak luas terhadap masalah sosial lainnya seperti rendahnya semangat kerja, kurang kreatif dan kurang percaya diri.
- g. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan Sosial sehingga pelayanan pada masyarakat kurang optimal.

3.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal

1. Peluang (Opportunity)

- a. Potensi sumber daya alam yang masih tersedia yang membuka peluang dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pola pendekatan secara kelompok dalam bentuk KUBE dan peningkatan Usaha Ekonomi Produktif;
- b. Keterlibatan dan peran serta aktif Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)s ditengah – tengah masyarakat & Lembaga masyarakat yang semakin baik dan bekerja sama dalam menangani masalah kesejahteraan sosial seperti yayasan – yayasan, Panti Sosial, LK3, K3S dan Karang Taruna sesuai fungsi sosialnya
- c. Pengelolaan Sumber Daya Personil dalam mendukung dan membantu tugas-tugas pelayanan Kesejahteraan sosial (Pegawai, Pendamping PKH, Pendamping aslut, Pendamping Panca Berat, Tagana, PSM)
- d. Partisipasi dunia usaha dilakukan melalui program corporate sosial responsibility (CSR) merupakan implementasikan tanggungjawab & Kepedulian perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan dan pelayanan kesejahteraan sosial

2. Ancaman (Threats)

- a. Tingkat kemiskinan penduduk yang relatif tinggi sehingga menimbulkan permasalahan sosial, seperti : Gepeng (gelandangan dan pengemis), Fakir Miskin, Anak terlantar, Anak Jalanan, Korban Narkoba, Korban HIV/AIDS, Keluarga Rentan, Lansia Terlantar & WTS;
- b. Kurangnya Pemanfaatan Potensi dan sumber daya pembangunan kesejahteraan sosial ;

- c. Rendahnya Tingkat pendapatan masyarakat yang berdampak luas terhadap masalah sosial lainnya seperti rendahnya semangat kerja, kurang kreatif , mandiri dan kurang percaya diri.

3.2. Isu Strategis

Dari uraian permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka teridentifikasi atau terangkum sebagai isu strategis yang dihadapi berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah , dalam kurun waktu tahun 2024-2026, sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya jumlah PPKS seiring dengan penambahan penduduk.
- 2) Tidak Sinkronnya Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- 3) Rendahnya keterampilan Penduduk Miskin
- 4) Belum terpenuhinya fasilitas Pelayanan dan Rehabilitasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti penyandang cacat, anak terlantar, anak jalanan, lansia terlantar, korban Napza, Orang dengan HIV / AIDS dan lain-lain.
- 5) Masih ditemuinya pengemis di jalan-jalan protokol yang berasal dari luar daerah .

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategi ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam memenuhi RPD untuk kurun waktu tiga tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategi ini juga akan memungkinkan Dinas Sosial Kota Jambi untuk mengukur sejauh mana Tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategi dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran organisasi.

Penetapan tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan RPD dan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan, penekanan pada faktor kunci keberhasilan dimaksudkan agar dalam pencapaian tujuan benar-benar telah memperhatikan faktor lingkungan dan mengetahui secara jelas kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Adapun Tujuan Strategis Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2024 – 2026 yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Kepada Korban Bencana Alam dan Sosial
2. Meningkatnya Pelayanan Kepada Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu
3. Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Sasaran strategis Dinas Sosial Kota Jambi merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dan dialokasikan 3 (tiga) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana kerja (Performance Plan). Penetapan

sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Sasaran strategis Dinas Sosial Kota Jambi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategik terkait juga telah dapat dicapai.

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program merupakan penjabaran dari tujuan secara teratur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh suatu Instansi / organisasi Pemerintah.

Untuk mencapai Tujuan Strategis tersebut diatas, maka sasaran strategis dari Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2024 – 2026 dapat dirumuskan dan dijabarkan dalam 3 (tiga) Sasaran Strategis sebagai berikut :

- 1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam Dan Sosial
- 2. Peningkatan Pelayanan kepada Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu
- 3. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS Terlantar Di Luar Panti

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada Tabel. T-C.25 di Bawah ini :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2024 – 2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke -		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Pelayanan Kepada		Tingkat Pelayanan pada Kondisi Pasca	100%	100 %	100 %

	Korban Bencana Alam dan Sosial		Kebakaran dan Non Kebakaran			
		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam Dan Sosial	Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	100%	100 %	100 %
2.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu		Persentase Penduduk Miskin	8,28	8,25	8,1
		Peningkatan Pelayanan kepada Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu	Persentase Pelayanan Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu yang Menerima Bantuan	100%	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase PPKS yang Tertangani	100%	100 %	100 %
		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS Terlantar Di Luar Panti	Persentase PPKS Terlantar Di Luar Panti Yang Tertangani	100%	100 %	100 %

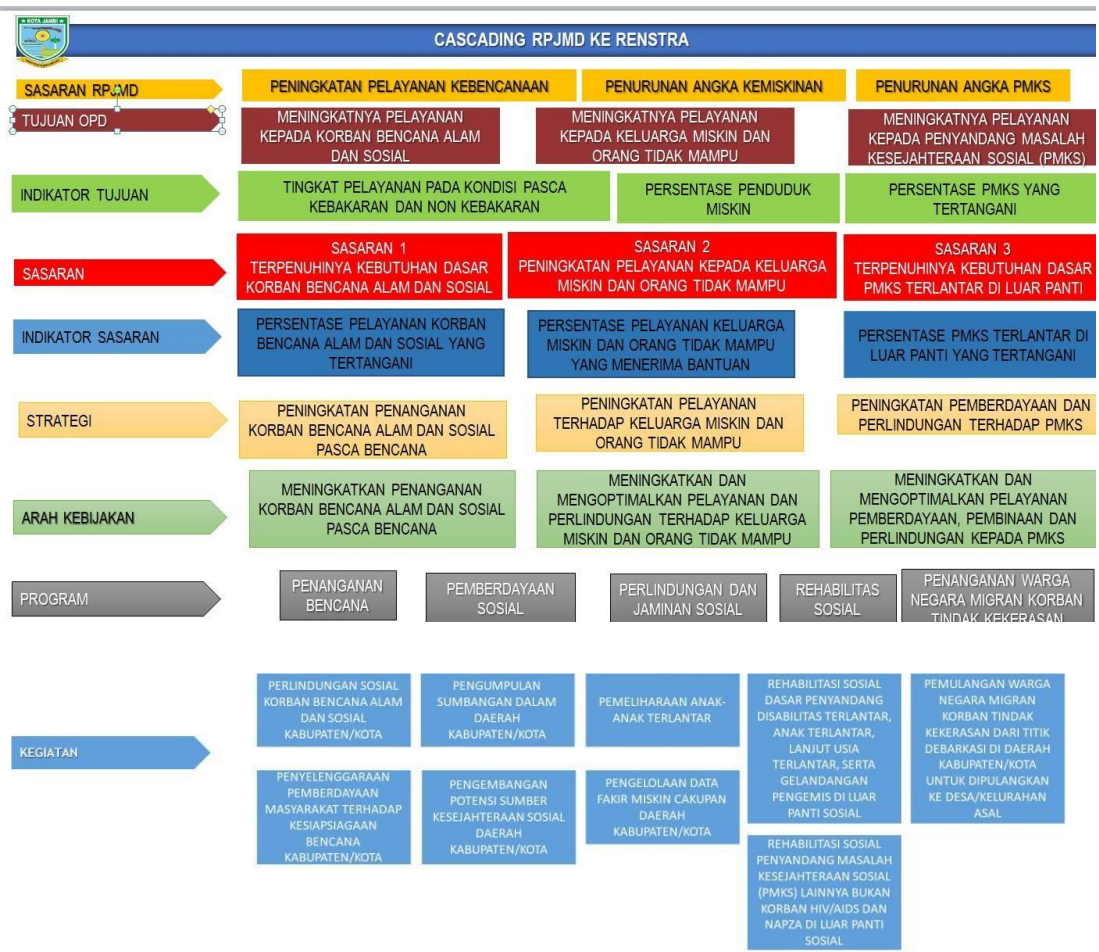
Perhitungan indikator tujuan/sasaran dari tujuan dan sasaran pada Dinas Sosial sebagai berikut :

- 1. Sasaran 1: Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial / Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani * 100 %
- 2. Sasaran 2 : Jumlah Pelayanan Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu / Jumlah Pelayanan Keluarga Miskin dan orang Tidak yang Menerima Bantuan * 100 %
- 3. Sasaran 3 : Jumlah PPKS Terlantar Di Luar Panti yang dijangkau / Jumlah PPKS Terlantar Di Luar Panti Yang Tertangani * 100 %

4.2 Cascading Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat serta memiliki keterkaitan sinergitas. Berikut Cascading yang ada pada Dinas Sosial Kota Jambi :



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu Strategi yang tepat dan akurat, guna mencapai hasil yang optimal untuk lima tahun kedepan. Adapun STRATEGI yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan adalah :

- 1) Peningkatan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Pasca Bencana.
- 2) Peningkatan Pelayanan terhadap keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- 3) Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap PPKS.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan – tindakan tertentu. Elemen penting dalam menyiapkan kebijaksanaan yang cocok adalah dapat dilaksanakan dan tidak hanya baik secara teoritis. Kebijakan meliputi ketentuan–ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan yang dikembangkan Dinas Sosial Kota Jambi meliputi :

- 1) Meningkatkan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Pasca Bencana.
- 2) Meningkatkan dan Mengoptimalkan Pelayanan dan Perlindungan kepada Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- 3) Meningkatkan dan Mengoptimalkan Pemberdayaan, Pembinaan dan Perlindungan kepada PPKS.

Adapun Kebijakan Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2024 – 2026 yang diambil dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kesejahteraan sosial dan Pemberian bantuan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- 2) Peningkatan Pembinaan dan keterampilan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Partisipasi masyarakat yang

optimal sebagai kekuatan dalam memecahkan permasalahan yang dialami oleh PPKS.

- 3) Peningkatan fungsi dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan masalah-masalah Kesejahteraan Sosial.

Table T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan Kepada Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam Dan Sosial	Peningkatan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Pasca Bencana	Meningkatkan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Pasca Bencana
Meningkatnya Pelayanan Kepada Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu	Persentase Penduduk Miskin	Peningkatan Pelayanan terhadap keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu	Meningkatkan dan Mengoptimalkan Pelayanan dan Perlindungan kepada Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu
Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Tertangani	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap PPKS	Meningkatkan dan Mengoptimalkan Pemberdayaan, Pembinaan dan Perlindungan kepada PPKS

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan sasaran yang harus dilaksanakan serta permasalahan-permasalahan yang diprediksi dalam bidang perencanaan maka rencana dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Skala Prioritas RPD Kota Jambi pada Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2024 – 2026 dapat di jabarkan pada program kegiatan sebagai berikut :

6.1.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - (2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - (3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - (4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - (5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
 - (6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - (7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - (2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - (3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - (4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - (1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - (1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - (2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - (3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - (3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - (4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - (5) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - (6) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- (1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - (2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - (3) Pengadaan Mebel
 - (4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - (5) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - (6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - (7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - (2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - (3) Pemeliharaan Mebel
 - (4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - (5) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - (6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- (7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- (8) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.1.2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- 1) Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
- 2) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - (1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - (2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - (3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - (4) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - (5) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

6.1.3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

- 1) Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
 - (1) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

6.1.4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - (1) Penyediaan Permakanan

- (2) Penyediaan Sandang
 - (3) Penyediaan Alat Bantu
 - (4) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - (5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - (6) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - (7) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - (8) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - (9) Pemberian Layanan Kedaruratan
 - (10) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - (11) Pemberian Layanan Rujukan
- 2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- (1) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - (2) Pemberian Layanan Kedaruratan
 - (3) Penyediaan Permakanan
 - (4) Penyediaan Sandang
 - (5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - (6) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
 - (7) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - (8) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - (9) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - (10) Pemberian Layanan Rujukan
 - (11) Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

6.1.5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- 1) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - (1) Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
- 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - (1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- (2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- (3) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- (4) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

6.1.6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - (1) Penyediaan Makanan
 - (2) Penyediaan Sandang
 - (3) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - (4) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - (5) Pelayanan Dukungan Psikososial
- 2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - (1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - (2) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

6.1.7. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

- 1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - (1) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - (2) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

6.2 PENDANAAN INDIKATIF RENSTRA OPD TAHUN 2024 – 2026

Pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan dibidang Sosial selama lima tahun kedepan, disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing program dan kegiatan, , secara terperinci dapat dilihat pada lampiran Tabel T-C. 27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2024 – 2026.

TABEL T-C 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Jambi

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun 2022		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		Unit Kerja Perangkat Daerah Penangga ung- jawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Kinerja	Angg aran	Kinerja	Angg aran	Kinerja	Angg aran	Kinerja	Angg aran	Kinerja	Angg aran	Kinerja	Angg aran	Kinerja	Angg aran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

		1.06.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<u>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</u>	B	7.098.601.978	B	6.472.100.910	BB	6.780.775.148	A	7.753.152.528	AA	8.410.266.446	AA	8.410.266.446	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	B	90.290.800	B	58.035.250	BB	100.916.350	A	111.009.050	AA	122.109.820	AA	122.109.820	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	36.911.800	2 Dokumen	44.260.700	2 Dokumen	45.434.800	2 Dokumen	49.978.800	2 Dokumen	54.976.800	2 Dokumen	54.976.800	Sekretariat	Kota Jambi

		1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.533.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	11.533.000	1 Dokumen	12.686.300	1 Dokumen	13.954.930	1 Dokumen	13.954.930	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.640.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	2.640.000	1 Dokumen	2.904.000	1 Dokumen	3.194.400	1 Dokumen	3.194.400	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.533.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	11.533.000	1 Dokumen	12.686.300	1 Dokumen	13.954.930	1 Dokumen	13.954.930	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.640.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	2.640.000	1 Dokumen	2.904.000	1 Dokumen	3.194.400	1 Dokumen	3.194.400	Sekretariat	Kota Jambi

		1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	22.272.000	4 Dokumen	13.774.550	4 Dokumen	15.374.550	4 Dokumen	16.912.550	4 Dokumen	18.603.550	4 Dokumen	18.603.550	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.761.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	11.761.000	1 Dokumen	12.937.100	1 Dokumen	14.230.810	1 Dokumen	14.230.810	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	4.534.358.392	100%	4.504.987.628	100%	4.555.979.500	100%	5.011.577.450	100%	5.512.735.195	100%	5.512.735.195	Sekretariat	Kota Jambi

		1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		4.321.879.143	36 Orang	4.315.472.628	36 Orang	4.335.000.000	36 Orang	4.768.500.000	36 Orang	5.245.350.000	36 Orang	5.245.350.000	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	36 Dokumen	-	36 Dokumen	10.000.000	36 Dokumen	11.000.000	36 Dokumen	12.100.000	36 Dokumen	12.100.000	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		191.820.000	12 Dokumen	189.515.000	12 Dokumen	194.820.000	12 Dokumen	214.302.000	12 Dokumen	235.732.200	12 Dokumen	235.732.200	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		20.659.249	1 Dokumen	-	1 Dokumen	16.159.500	1 Dokumen	17.775.450	1 Dokumen	19.552.995	1 Dokumen	19.552.995	Sekretariat	Kota Jambi

		1.06.01.1.03.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	34.560.000	100 %	40.490.000	100%	40.490.000	100%	44.539.000	100%	48.992.900	100%	48.992.900	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		34.560.000	12 Laporan	40.490.000	12 Laporan	40.490.000	12 Laporan	44.539.000	12 Laporan	48.992.900	12 Laporan	48.992.900	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	100 %	298.100.000	100 %	168.100.000	100%	136.500.000	100%	144.000.000	100%	152.250.000	100%	152.250.000	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Nnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		111.900.000	80 Stel	103.100.000	82 Stel	61.500.000	82 Stel	61.500.000	82 Stel	61.500.000	82 Stel	61.500.000	Sekretariat	Kota Jambi

		1.06.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		126.200.000	12 Dokumen	10.800.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	16.500.000	12 Dokumen	18.150.000	12 Dokumen	18.150.000	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		60.000.000	40 Orang	54.200.000	50 Orang	60.000.000	55 Orang	66.000.000	60 Orang	72.600.000	60 Orang	72.600.000	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	100%	181.976.931	100%	301.507.298	100%	326.507.298	100%	409.158.028	100%	445.073.831	100%	445.073.831	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.333.560	1 Paket	15.276.936	1 Paket	15.276.936	1 Paket	16.804.630	1 Paket	18.485.093	1 Paket	18.485.093	Sekretariat	Kota Jambi

		1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	83.168.660	1 Paket	81.361.962	1 Paket	81.361.962	1 Paket	89.498.158	1 Paket	98.447.974	1 Paket	98.447.974	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	38.474.711	1 Paket	37.118.400	1 Paket	37.118.400	1 Paket	40.830.240	1 Paket	44.913.264	1 Paket	44.913.264	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	167.750.000	12 Laporan	192.750.000	12 Laporan	212.025.000	12 Laporan	233.227.500	12 Laporan	233.227.500	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	-	-	-	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	Sekretariat	Kota Jambi

		1.06.01.1.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaa n Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Do ku me n		1 2 D o k u m e n	-	-	-	12 Doku men	20.00 0.000	12 Doku men	20.00 0.000	12 Doku men	20.00 0.000	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.0 7	Kegiatan Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	310.50 9.900	1 0 0 %	254. 603. 440	100%	250.0 00.00 0	100%	575.0 00.00 0	100%	575.0 00.00 0	100%	575.0 00.00 0	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	0	U ni t		Unit	-	1 Unit	250.0 00.00 0	1 Unit	250.0 00.00 0	1 Unit	250.0 00.00 0	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Uni t	36.000 .000	1 1 U ni t	187. 000. 000	Unit	-	5 Unit	100.0 00.00 0	5 Unit	100.0 00.00 0	5 Unit	100.0 00.00 0	Sekretariat	Kota Jambi

		1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	72.227.100	142 Unit	41.318.640	10 Unit	50.000.000	20 Unit	100.000.000	20 Unit	100.000.000	20 Unit	100.000.000	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	0	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	159.122.800	4 Unit	26.284.800	15 Unit	200.000.000	15 Unit	125.000.000	15 Unit	125.000.000	15 Unit	125.000.000	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 buah	43.160.000	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Sekretariat	Kota Jambi

		1.06.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	615.78 1.600	1 0 0 %	520. 843. 600	100%	502.0 12.00 0	100%	502.6 62.00 0	100%	503.3 77.00 0	100%	503.3 77.00 0	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 0 surat	9.000. 000	1 2 L a p o r a n	6.23 0.00 0	12 Lapor an	6.500. 000	12 Lapor an	7.150. 000	12 Lapor an	7.865. 000	12 Lapor an	7.865 .000	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	198 unit	271.50 0.000	1 2 L a p o r a n	187. 000. 000	12 Lapor an	200.0 00.00 0	12 Lapor an	200.0 00.00 0	12 Lapor an	200.0 00.00 0	12 Lapor an	200.0 00.00 0	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	240 orang/ bulan	335.28 1.600	1 2 L a p o r a n	327. 613. 600	12 Lapor an	295.5 12.00 0	12 Lapor an	295.5 12.00 0	12 Lapor an	295.5 12.00 0	12 Lapor an	295.5 12.00 0	Sekretariat	Kota Jambi

		1.06.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	1.033.024.355	100 %	623.533.694	100%	868.370.000	100%	955.207.000	100%	1.050.727.700	100%	1.050.727.700	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 unit	253.667.600	7 Unit	-	7 Unit	150.000.000	7 Unit	165.000.000	7 Unit	181.500.000	7 Unit	181.500.000	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	245.597.600	30 Unit	436.030.000	30 Unit	443.370.000	30 Unit	487.707.000	30 Unit	536.477.700	30 Unit	536.477.700	Sekretariat	Kota Jambi

		1.06.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 unit	15.000.000	50 Unit	-	50 Unit	15.000.000	50 Unit	16.500.000	50 Unit	18.150.000	50 Unit	18.150.000	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	23.050.000	25 Unit	-	25 Unit	30.000.000	25 Unit	33.000.000	25 Unit	36.300.000	25 Unit	36.300.000	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	40 unit	6.798.000	25 Unit	-	25 Unit	10.000.000	25 Unit	11.000.000	25 Unit	12.100.000	25 Unit	12.100.000	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	-	-	2 Unit	-	2 Unit	150.000.000	2 Unit	165.000.000	2 Unit	181.500.000	2 Unit	181.500.000	Sekretariat	Kota Jambi
		1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	41 unit	488.911.155	50 Unit	125.618.694	50 Unit	70.000.000	50 Unit	77.000.000	50 Unit	84.700.000	50 Unit	84.700.000	Sekretariat	Kota Jambi

		1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	-	-	100 Unit	61.885.000	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Sekretariat	Kota Jambi
- Meningkatnya Pelayanan Kepada Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu - Meningkatnya Pelayanan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Peningkatan Pelayanan kepada Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS terlantar di Luar Panti	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	<u>PERSENTASE PEMBERDAYAAN SOSIAL POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DALAM MENANGAN I PPKS</u>	100 %	1.660.545.670	100 %	1.641.609.770	100%	1.800.000.000	100%	1.980.000.000	100%	2.178.000.000	100%	2.178.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Jambi
		1.06.02.2.02	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Rekomendasi Izin PUB yang diterbitkan	100 %	46.111.000	50 Izin	28.955.910	50 Izin	55.000.000	75 Izin	60.500.000	100 Izin	66.550.000	100 Izin	66.550.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Jambi

		1.06.02.2.02 .0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	50 orang	46.111.000	50 Dokumen	28.955.910	50 Dokumen	55.000.000	75 Dokumen	60.500.000	100 Dokumen	66.550.000	50 Dokumen	66.550.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Jambi
		1.06.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang diberdayakan	100 %	1.614.434.670	170 Orang	1.612.653.860	170 Orang	1.745.000.000	170 Orang	1.919.500.000	170 Orang	2.111.450.000	170 Orang	2.111.450.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Jambi
		1.06.02.2.03 .0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	62 orang	417.373.800	68 Orang	493.126.040	68 Orang	510.000.000	68 Orang	561.000.000	68 Orang	617.100.000	68 Orang	617.100.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Jambi

		1.06.02.2.0 3.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 orang	155.108.000	11 Orang	151.928.830	11 Orang	155.000.000	11 Orang	170.500.000	11 Orang	187.500.000	11 Orang	187.500.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Jambi
		1.06.02.2.0 3.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	79 orang	651.114.500	100 Keluarga	599.581.300	150 Keluarga	700.000.000	200 Keluarga	770.000.000	200 Keluarga	847.000.000	200 Keluarga	847.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Jambi
		1.06.02.2.0 3.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 LKS	307.659.670	36 Lembaga	295.421.200	36 Lembaga	300.000.000	36 Lembaga	330.000.000	36 Lembaga	363.000.000	36 Lembaga	363.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Jambi

			an Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota				a											
		1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 LK3	83.178.700	5 Sertifikat	72.596.490	5 Sertifikat	80.000.000	5 Sertifikat	88.000.000	5 Sertifikat	96.800.000	5 Sertifikat	96.800.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Jambi
Meningkatnya Pelayanan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS terlanter di Luar Panti	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	<u>Persentase Penanganan</u> <u>Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</u>	100 %	85.208.310	100 %	53.063.080	100%	60.000.000	100%	66.000.000	100%	72.600.000	100%	72.600.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi
		1.06.03.2.01	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran	100 %	85.208.310	200 Orang	53.063.080	200 Orang	60.000.000	225 Orang	66.000.000	250 Orang	72.600.000	250 Orang	72.600.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi

			Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			n g											
		1.06.03.2.01.001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	85.208.310	200 Orang	53.063.080	200 Orang	60.000.000	225 Orang	66.000.000	250 Orang	72.600.000	250 Orang	72.600.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi

Meningkatnya Pelayanan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS terlantar di Luar Panti	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<u>Persentase Rehabilitasi sosial yang di Layani</u>	100 %	1.291.283.581	100 %	1.272.929.003	100%	2.425.000.000	100%	2.667.500.000	100%	2.934.250.000	100%	2.934.250.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi
		1.06.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang di layani	100 %	576.078.792	1000 Orang	584.046.190	1000 Orang	1.025.000.000	1250 Orang	1.127.500.000	1500 Orang	1.240.250.000	1500 Orang	1.240.250.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi
		1.06.04.2.01.001	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi	50 orang	156.490.130	100 Orang	198.178.700	250 Orang	200.000.000	275 Orang	220.000.000	300 Orang	242.000.000	300 Orang	242.000.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi

				Minimal Kewenangan Kabupaten/K ota														
		1.06.04.2.01.0 002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/K ota	50 ora ng	100.80 9.482	10 0 Or an g	63.4 80.3 40	250 Oran g	150.0 00.00 0	275 Oran g	165.0 00.00 0	300 Orang	181.5 00.00 0	300 Orang	181.5 00.00 0	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi
		1.06.04.2.01.0 003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatka n Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/K ota	50 ora ng	127.04 7.000	10 0 Or an g	131. 312. 810	70 Oran g	200.0 00.00 0	80 Oran g	220.0 00.00 0	90 Orang	242.0 00.00 0	300 Orang	242.0 00.00 0	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi
		1.06.04.2.0 1.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan		-	Or an g	-	250 Oran g	25.00 0.000	275 Oran g	27.50 0.000	300 Orang	30.25 0.000	300 Orang	30.25 0.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi

				Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		-	Orang	-	250 Orang	75.000.000	275 Orang	82.500.000	300 Orang	90.750.000	300 Orang	90.750.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi
		1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan		-	Orang	-	250 Orang	75.000.000	275 Orang	82.500.000	300 Orang	90.750.000	300 Orang	90.750.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi

				Kabupaten/Kota														
		1.06.04.2.01.008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	191.732.180	100 Orang	191.074.340	200 Orang	200.000.000	225 Orang	220.000.000	250 Orang	242.000.000	300 Orang	242.000.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi
		1.06.04.2.01.009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	Orang	-	250 Orang	25.000.000	275 Orang	27.500.000	300 Orang	30.250.000	300 Orang	30.250.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi
		1.06.04.2.01.010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	Orang	-	250 Orang	25.000.000	275 Orang	27.500.000	300 Orang	30.250.000	300 Orang	30.250.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi

		1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		-	Orang	-	250 Orang	25.000.000	275 Orang	27.500.000	300 Orang	30.250.000	300 Orang	30.250.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi
		1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	Orang	-	250 Orang	25.000.000	275 Orang	27.500.000	300 Orang	30.250.000	300 Orang	30.250.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi
		1.06.04.2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di	100 %	715.204.789	500 Orang	688.882.813	500 Orang	1.400.000.000	750 Orang	1.540.000.000	1000 Orang	1.694.000.000	1000 Orang	1.694.000.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi

			dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Luar Panti Sosial yang di layani														
		1.06.04.2.02. 0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatka n Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/K ota	-	-	Or an g	-	200 Orang	100.0 00.00 0	225 Orang	110.0 00.00 0	250 Orang	121.0 00.00 0	250 Orang	121.0 00.00 0	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi
		1.06.04.2.02.0 002	Pemberian Layanan Kedarurata n	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/K ota	60 ora ng	490.01 5.100	10 0 Or an g	470. 569. 473	250 Orang	450.0 00.00 0	275 Orang	495.0 00.00 0	300 Orang	544.5 00.00 0	250 Orang	544.5 00.00 0	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi
		1.06.04.2.02.0 003	Penyediaan Permakana n	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	300 ora ng	225.18 9.689	10 0 Or an g	218. 313. 340	200 Orang	250.0 00.00 0	225 Orang	275.0 00.00 0	250 Orang	302.5 00.00 0	250 Orang	302.5 00.00 0	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi

				Kabupaten/Kota														
		1.06.04.2.02.004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		-	Orang	-	200 Orang	150.000.000	225 Orang	165.000.000	250 Orang	181.500.000	250 Orang	181.500.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi
		1.06.04.2.02.007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		-	Orang	-	200 Orang	100.000.000	225 Orang	110.000.000	250 Orang	121.000.000	250 Orang	121.000.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi
		1.06.04.2.02.008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada		-	Orang	-	200 Orang	100.000.000	225 Orang	110.000.000	250 Orang	121.000.000	250 Orang	121.000.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi

			Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota														
		1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		-	Orang	-	200 Orang	50.000.000	225 Orang	55.000.000	250 Orang	60.500.000	250 Orang	60.500.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi
		1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		-	Orang	-	200 Orang	50.000.000	225 Orang	55.000.000	250 Orang	60.500.000	250 Orang	60.500.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi

		1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		-	Orang	-	200 Orang	50.000.000	225 Orang	55.000.000	250 Orang	60.500.000	250 Orang	60.500.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi
		1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	Orang	-	200 Orang	50.000.000	225 Orang	55.000.000	250 Orang	60.500.000	250 Orang	60.500.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi
		1.06.04.2.02.0014	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial		-	Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.500.000	1 Dokumen	60.500.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Jambi

Meningkatnya Pelayanan Kepada Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu	Peningkatan Pelayanan kepada Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<u>Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS Terlayani</u>	100 %	8.126.175.808	100 %	470.310.675	100%	1.500.000.000	100%	1.650.000.000	100%	1.815.000.000	100%	1.815.000.000	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Warga Negara Migran	Kota Jambi
		1.06.05.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	100 %	39.704.648	25 Orang	27.034.405	30 Orang	50.000.000	35 Orang	55.000.000	40 Orang	60.500.000	40 Orang	60.500.000	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Warga Negara Migran	Kota Jambi
		1.06.05.2.01.001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	39.704.648	25 Orang	27.034.405	30 Orang	50.000.000	35 Orang	55.000.000	40 Orang	60.500.000	40 Orang	60.500.000	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Warga Negara Migran	Kota Jambi
		1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin	100 %	8.086.471.160	7200 KK	443.276.270	7200 KK	1.450.000.000	7200 KK	1.595.000.000	72000 KK	1.754.500.000	72000 KK	1.754.500.000	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Warga Negara Migran	Kota Jambi

		1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	27.000 KK	500.149.850	Orang	-	10.000 Orang	150.000.000	11.000 Orang	165.000.000	12.000 Orang	181.500.000	12.000 Orang	181.500.000	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Warga Negara Migran	Kota Jambi
		1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota		-	7500 Keluarga	161.909.705	1000 Keluarga	250.000.000	1250 Keluarga	275.000.000	1500 Keluarga	302.500.000	1500 Keluarga	302.500.000	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Warga Negara Migran	Kota Jambi
		1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	500 paket	7.458.049.910	5000 Keluarga	108.000.000	1000 Keluarga	250.000.000	1250 Keluarga	275.000.000	1500 Keluarga	302.500.000	1500 Keluarga	302.500.000	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Warga Negara Migran	Kota Jambi
		1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan	Jumlah Orang Mendapatkan	120 orang	128.271.400	1000 Orang	173.366.565	250 Orang	800.000.000	275 Orang	880.000.000	300 Orang	968.000.000	300 Orang	968.000.000	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan	Kota Jambi

			Ekonomi Masyarakat	Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			ra n g										Warga Negara Migran	
Meningkatnya Pelayanan Kepada Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	<u>Persentase Penanganan Bencana saat Tanggap Darurat</u>	100 %	737.859.710	100 %	700.486.562	100%	1.025.000.000	100%	1.127.500.000	100%	1.240.250.000	100%	1.240.250.000	Bidang Penanganan Bencana	Kota Jambi
		1.06.06.2.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	Jumlah Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	100 %	328.865.550	300 Kejadian	309.469.580	300 Kejadian	600.000.000	325 Kejadian	660.000.000	350 Kejadian	726.000.000	350 Kejadian	726.000.000	Bidang Penanganan Bencana	Kota Jambi
		1.06.06.2.01.001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan	3.000 KK	141.264.900	200 Orang	121.837.500	250 Orang	250.000.000	275 Orang	275.000.000	300 Orang	302.500.000	300 Orang	302.500.000	Bidang Penanganan Bencana	Kota Jambi

				Kabupaten/Kota														
		1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 KK	68.634.050	200 Orang	127.997.420	250 Orang	250.000.000	275 Orang	275.000.000	300 Orang	302.500.000	300 Orang	302.500.000	Bidang Penanganan Bencana	Kota Jambi
		1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 KK	38.069.650	100 Unit	34.981.410	5 Unit	50.000.000	7 Unit	55.000.000	10 Unit	60.500.000	10 Unit	60.500.000	Bidang Penanganan Bencana	Kota Jambi
		1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus	50 KK	13.940.380	300 Orang	12.354.000	30 Orang	25.000.000	40 Orang	27.500.000	50 Orang	30.250.000	50 Orang	30.250.000	Bidang Penanganan Bencana	Kota Jambi

				bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/K ota														
		1.06.06.2.01.0 005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatka n Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/K ota	50 KK	66.956 .570	2 0 0 O ra n g	12.2 99.2 50	30 Oran g	25.00 0.000	40 Oran g	27.50 0.000	50 Orang	30.25 0.000	50 Orang	30.25 0.000	Bidang Penanganan Bencana	Kota Jambi
		1.06.06.2.02	Kegiatan Penyeleng garaan Pemberda yaan Masyaraka t terhadap Kesiapsiag aan Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Penyelengg araan Pemberdaya an Masyarakat terhadap Kesiapsiaga an Bencana	100 %	408.99 4.160	1 0 0 O ra n g	391. 016. 982	100 Oran g	425.0 00.00 0	125 Oran g	467.5 00.00 0	150 Oran g	514.2 50.00 0	150 Oran g	514.2 50.00 0	Bidang Penanganan Bencana	Kota Jambi
		1.06.06.2.0 2.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaa n Kampung Siaga	Jumlah Kampung yang Melaksana n Koordinasi, Sosialisasi	3 KS B	107.52 4.960	2 K a m p u	55.8 64.4 82	2 Kam pung	75.00 0.000	2 Kamp ung	82.50 0.000	2 Kamp ung	90.75 0.000	2 Kamp ung	90.75 0.000	Bidang Penanganan Bencana	Kota Jambi

			Bencana	dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/K ota			n g											
		1.06.06.2.02.002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaa n Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksana n Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/K ota	1 Kali	301.46 9.200	5 0 O r a n g	335. 152. 500	50 Oran g	350.0 00.00 0	75 Oran g	385.0 00.00 0	100 Orang	423.5 00.00 0	100 Orang	423.5 00.00 0	Bidang Penanganan Bencana	Kota Jambi
		1.06.07	PROGRAM PENGELO LAAN TAMAN MAKAM PAHLAWA N	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		-	1 0 0 %	-	100%	150.0 00.00 0	100%	165.0 00.00 0	100%	181.5 00.00 0	100%	181.5 00.00 0	Bidang Pemberdaya an Sosial	Kota Jambi
		1.06.07.2.01	Kegiatan Pemelihar aan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Jumlah Pemeliharaa n Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota		-	0 M a k a m	-	1 Maka m	150.0 00.00 0	1 Maka m	165.0 00.00 0	1 Maka m	181.5 00.00 0	1 Maka m	181.5 00.00 0	Bidang Pemberdaya an Sosial	Kota Jambi

		1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	121.000.000	1 Dokumen	121.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Jambi
		1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		-	0 Makam	-	1 Makam	50.000.000	1 Makam	55.000.000	1 Makam	60.500.000	1 Makam	60.500.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Jambi
	TOTAL ANGGARAN									13.740.775.148		15.409.152.528		16.831.866.446		16.831.866.446		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja OPD yang cara langsung menunjukkan Kinerja yang akan dicapai OPD dalam tiga tahun mendatang sebagai Komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan Sasaran RPD.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, untuk mengukur kinerja diperlukan indikator kinerja sasaran dan indikator kegiatan. Indikator kinerja sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada kurun waktu perencanaan strategis yang ditetapkan pada indikator kinerja kegiatan terbagi dalam lima kelompok indikator kinerja yaitu Indikator masukan (Input), keluaran (Out Put), hasil (Out Come), manfaat (Benefits), dan dampak (Impacts).

Indikator kinerja masukan yang disusun harus telah mengidentifikasi sumber daya apa yang tersedia untuk menghasilkan keluaran. Indikator keluaran lebih terkait dengan hasil Fisik maupun jasa yang dicapai dengan dilaksanakan suatu kegiatan

Untuk mengetahui pemanfaatan keluaran yang dihasilkan oleh kegiatan perlu disusun indikator hasil yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka pendek maupun jangka menengah, indikator yang perlu disusun berikutnya adalah indikator yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan yaitu indikator manfaat dan dampak.

a. Pengukuran Kinerja

Salah satu kunci keberhasilan dalam implementasi perencanaan strategis adalah menyiapkan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja mencakup :

- a) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan

- b) Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam rencana kinerja

b. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja oleh karena itu dalam melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuran yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi kinerja juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa datang. Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran. Dalam evaluasi kinerja didulukan pula analisis efesiensi dan efektifitas. Analisis efesiensi dilakukan dengan membandingkan antara output tertentu yang dihasilkan dengan input tertentu. Analisis efektivitas dilakukan untuk menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil.

Untuk mewujudkan kebijakan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan beserta indikator kinerja pembangunan yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode RPD 2024–2026. Capaian tersebut ditargetkan selama kurun waktu 5 tahun ke depan yang ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang akan diimplementasikan oleh masing-masing OPD dapat terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Program-program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya jangka menengah yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2024–2026, diklasifikasikan berdasarkan prioritas dalam pembangunan Daerah Kota Jambi yaitu:

- (1) Kota Layak Anak.
- (2) Kegiatan Khusus lansia dan Disabilitas.
- (3) Peningkatan akses dan Responsibilitas terhadap keluhan Masyarakat berbasis IT Pemberdayaan Masyarakat & Peningkatan Kesejahteraan sosial,

Penetapan rencana strategis adalah langkah awal dalam proses pengukuran kinerja. Dalam proses tersebut sistem pengukuran kinerja akan relevan jika konteks dalam suatu organisasi telah terbentuk kesepakatan terhadap sasaran yang akan dicapai dan telah ditetapkan dengan baik serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapainya.

Pengukuran kinerja akan memberikan makna pada tujuan, sasaran dan strategi jika hasil (outcome) sasaran maupun program/kegiatan dapat dikuantifikasi guna menetapkan harapan yang terukur (measurable expectation). Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu penggunaan sumber daya seperti anggaran sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.

Dalam sebuah proses pengukuran kinerja diperlukan pemilihan indikator kinerja. Dalam konteks Pemerintah Daerah Kota Jambi sesuai Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu ditetapkan adanya indikator kinerja daerah. Selain indikator kinerja perlu juga dipertimbangkan adanya ketersediaan data terutama data statistik yang tepat.

Ketidak tepatan data yang digunakan akan menggagalkan pengukuran kinerja pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. Kelemahan yang sering terjadi dalam pemilihan indikator kinerja adalah tidak konsisten karena tidak jelasnya dimensi yang hendak diukur. Oleh karena itu dalam penyusunan RPD diperlukan penetapan indikator kinerja yang akan dipergunakan dalam pengukuran capaian kinerja secara periodek dan sebagai cerminan efektivitas sasaran dan program serta anggaran yang dilaksanakan setiap tahun

Hasil Rekapitulasi Indikator Kinerja Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Jambi selama tahun 2024 – 2026 yang mendukung pencapaian setiap tujuan dan sasaran dari Program dan Kegiatan yang telah direncanakan, serta terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu kepada Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, tujuan dan Sasaran RPD, serta Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Jambi dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Jambi

No	Sasaran /IKU	Indikator Kinerja Sasaran/IKU	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD 2024-2026
					Transisi	I	II	III	
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terpenuhinya Kebutuhan Korban Bencana Alam dan Sosial	Tingkat Pelayanan pada Kondisi Pasa Kebakaran dan Non Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
2	Peningkatan Pelayanan Kepada Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu	Persentase Penduduk Miskin	%	9.0	8.9	8.28	8.25	8.1	8.1

3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS Terlantar di Luar Panto	Persentasee PPKS Yang Tertangani	%	100	85	100	100	100	100
---	--	--	---	-----	----	-----	-----	-----	-----

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2024 – 2026 ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan dipakai sebagai acuan bagi segenap jajaran aparatur dilingkungan Dinas Kota Jambi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dibidang Sosial.

Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dibidang Sosial sesuai dengan Renstra ini disamping sangat tergantung dari peran serta masyarakat dan dunia usaha, aparatur, diperlukan juga sikap mental, tekad dan semangat serta komitmen yang tinggi dari para penyelenggaranya. Faktor-faktor ini dapat dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengalamannya serta koordinasi yang semakin mantap, sehingga hasilnya dapat menjadi optima. Sebagai upaya mencapai hasil yang maksimal dari upaya pembangunan bidang Sosial Kota Jambi, maka harus diawali dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang mantap dan pengawasan yang kuat. Untuk keperluan dimaksud diharapkan ada dukungan kebijaksanaan Pemerintah Kota Jambi dalam penyediaan sumber daya yang diperlukan, yaitu SDM, sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang memadai.

Perencanaan strategis ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran Dinas Sosial yang merupakan perwujudan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Daerah Kota Jambi. Tentunya rencana ini harus pula tertuang dalam APBD Kota Jambi, APBD Provinsi, dan APBN. Penyusunan Renstra Dinas Sosial telah disusun sesuai dengan program prioritas dan kondisi yang ada pada Dinas Sosial Kota Jambi yang dituangkan kedalam program dan kegiatan. Hal ini tidak akan ada artinya apabila tidak ditindak lanjuti pada tingkat operasional untuk mengimplementasikannya. Berkenaan dengan itu pula diharapkan kepada semua pihak terkait untuk mendukung merealisasikannya .

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2024 – 2026 merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran, Kebijakan Program dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD) berikutnya. Untuk itu perlu ditentukan kaedah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Unit Kerja/Bidang dan Sekretariat Dinas Sosial Kota Jambi, masyarakat, dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renstra ini dengan sebaik-baiknya.
 2. Unit Kerja/Bidang dan Sekretariat Dinas Sosial Kota Jambi dalam menyusun Renstra telah memuat Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Program sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi bidang. Untuk itu dalam membuat program agar disesuaikan dengan RPD Kota Jambi yang nantinya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja OPD.
 3. Unit Kerja/bidang pada Dinas Sosial berkewajiban menjamin konsistensi antara RPD Kota Jambi dengan Renstra Dinas Sosial Kota Jambi.
- 4.1. Unit Kerja/ Bidang pada Dinas Sosial Kota Jambi berkewajiban mengoptimalkan penggunaan sumberdaya untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra OPD tahun 2024-2026.

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Renstra OPD tahun 2024 -2026, maka Kepala Dinas Sosial Kota Jambi berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran Renstra ini kedalam Rencana Kerja OPD . Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan Rencana Kerja (Renja OPD) tahun berikutnya disesuaikan dengan Renstra yang telah ditetapkan.

Demikian Perencanaan Strategis Dinas Sosial Kota Jambi yang wajib dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh semua aparatur di lingkungan Dinas melalui kerja sama terpadu dengan instalasi terkait, LSM, kalangan dunia usaha dan masyarakat

Jambi, 21 Mei 2024

KEPALA DINAS SOSIAL

KOTA JAMBI



YUNITA INDRAMAWATI, AP. MP. CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19740607 199403 2 002